

**ANALISIS *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGUKURAN KINERJA
KEUANGAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG (PUPR) KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH :

**NANDINI HUMAIRA
NPM : 1902110039**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 20 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NANDINI HUMAIRA
NPM : 1902110039

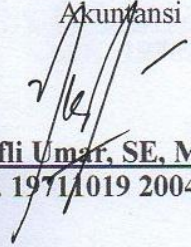
Dengan judul:

**ANALISIS *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGUKURAN KINERJA
KEUANGAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA
BANDA ACEH TAHUN
2020-2022**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

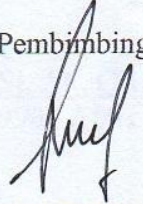
Ketua Program Studi
Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19760202 200607 2 001

Pembimbing II


Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19750211 200406 2 001

Mengetahui,
Dekan,


Drs. H. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 20 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NANDINI HUMAIRA
NPM : 1902110039

Dengan judul:

**ANALISIS *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGUKURAN KINERJA
KEUANGAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA
BANDA ACEH TAHUN
2020-2022**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 08 Agustus 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

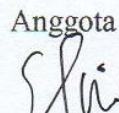
Ketua

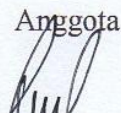
Sekretaris

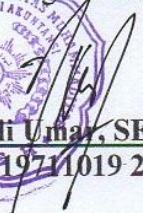

Syamsidar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19730921 199901 2 001

Anggota

Anggota


Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19760202 200607 2 001


Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19750211 200406 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 20 Agustus 2023
Yang Menyatakan



NANDINI HUMAIRA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nandini Huimaira
NPM : 1902110039
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020-2022

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 20 Agustus 2023

Yang Menyatakan



NANDINI HUMAIRA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis *Value For Money* Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2022**”. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

4. Ibu Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA selaku pembimbing pertama penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Irmawati, SE, M.Si, Ak. CA selaku pembimbing kedua penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teoritis	7
2.1.1 <i>Value For Money</i>	7
2.1.2 Kinerja	9
2.1.3 Anggaran	10
2.1.4 Kinerja Keuangan	11
2.1.5 Rasio Ekonomi	13
2.1.6 Rasio Efisiensi	15
2.1.7 Rasio Efektivitas.....	17
2.2 Penelitian Sebelumnya	19
2.3 Kerangka Pemikiran	25
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	28
3.1.1. Tujuan Penelitian Penelitian	28
3.1.2. Jenis Penelitian	29
3.1.3. Tingkat Intervensi Peneliti	29
3.1.4. Horizon Waktu	29
3.1.5. Unit Analisis	30
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	30
3.3 Teknik Analisis Data	31
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	35
4.1.1 Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh	35
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh.....	36
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh.....	37

4.2. Hasil Penelitian.....	38
4.2.1 Rasio Ekonomi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh	38
4.2.2 Rasio Efisiensi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh.....	40
4.2.3 Rasio Efektivitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh.....	42
4.3. Pembahasan	43
4.3.1 Analisis dan Pembahasan Rasio Ekonomi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh	43
4.3.2 Analisis dan Pembahasan Rasio Efisiensi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh	45
4.3.3 Analisis dan Pembahasan Rasio Efektivitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh	47
 BAB VKESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	50
5.2. Saran	50
 DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Persentase Tingkat Penggunaan Anggaran Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh dari Tahun 2020-2022	3
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi.....	14
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi	17
Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas	19
Tabel 2.4 Penelitian Sebelumnya	22
Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi.....	33
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi	34
Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas	34
Tabel 4.1 Hasil Rasio Ekonomi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh dari Tahun 2020-2022 ..	39
Tabel 4.2 Hasil Rasio Efisiensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh dari Tahun 2020-2022	41
Tabel 4.3 Hasil Rasio Efektivitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh dari Tahun 2020-2022 .	43
Tabel 4.4 Target anggaran belanja dan Realisasi Anggaran belanja Anggaran Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh dari Tahun 2020-2022	44
Tabel 4.5 Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh Dari Tahun 2020-2022.....	45
Tabel 4.6 Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh dari Tahun 2020-2022 ..	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	27

**ANALISIS *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGUKURAN KINERJA
KEUANGAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG (PUPR) KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020-2022**

**NANDINI HUMAIRA
NPM 1902110039**

Pembimbing : 1. Eva Susanti, SE, M.Si, Ak. CA
2. Irmawati, SE, M.Si, Ak. CA

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat ekonomis, efisiensi, efektivitas keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2020-2022 dengan memakai analisis *Value For Money*. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ditinjau dari tingkat ekonomis adalah bahwa pada tahun 2020-2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh berhasil mencapai tingkat ekonomis kinerja antara 81,65% sampai 81,63% dengan kriteria cukup ekonomis. Dari segi efisiensi hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh tahun 2020-2022 rata-rata sebesar 6306,893%. Dari segi efektivitas hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh tahun 2020-2022 rata-rata sebesar 25%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh dapat dikatakan tidak efisien dalam pengelolaan keuangan. Dari segi rasio ekonomi kinerja pengelolaan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh dapat dikatakan cukup ekonomis, dari segi rasio efisiensi dapat dikatakan tidak efektif, dan dari segi rasio efektivitas tidak efektif dalam pendapatan.

Kata Kunci: *kinerja keuangan, Value For Money, Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas.*

*VALUE FOR MONEY ANALYSIS IN MEASUREMENT OF FINANCIAL
PERFORMANCE IN PUBLIC WORKS AND SPATIAL PLANNING (PUPR)
DEPARTMENT OF BANDA ACEH CITY 2020-2022*

NANDINI HUMAIRA
NPM 1902110039

Advisors : 1. Eva Susanti, SE, M.Si, Ak. CA
2. Irmawati, SE, M.Si, Ak. CA

ABSTRACT

This research was conducted to measure the level of economy, efficiency, and financial effectiveness at the Public Works and Spatial Planning Office of Banda Aceh City in 2020-2022 by using Value For Money analysis. This research uses descriptive analysis method. The results of the study in terms of the economic level are that in 2020-2022 the Public Works and Spatial Planning Office of the City of Banda Aceh has succeeded in achieving an economic level of performance between 81.65% to 81.63% with the criteria being quite economical. In terms of efficiency, the results of the study show that the efficiency level of the financial performance of the Public Works and Spatial Planning Office of the City of Banda Aceh in 2020-2022 averages 6306.893%. In terms of effectiveness, the results of the study show that the level of effectiveness in the financial performance of the Banda Aceh City Public Works and Spatial Planning Office for 2020-2022 is an average of 25%. This condition illustrates that the financial performance of the Public Works and Spatial Planning Office of the City of Banda Aceh can be said to be inefficient in financial management. In terms of economic ratios, the performance of financial management at the Public Works and Spatial Planning Office of Banda Aceh City can be said to be quite economical, in terms of efficiency ratios it can be said to be ineffective, and in terms of effectiveness ratios it is not effective in terms of income.

Keywords: *financial performance, Value For Money, Economy, Efficiency and Effectiveness.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah. Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Anggaran juga merupakan suatu rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu serta dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari pengguna dana dan pertanggungjawaban kepada publik (Rasyidi, 2021). Anggaran memiliki sifat khas tertentu dengan mengukur anggaran dalam satuan keuangan maupun nonkeuangan, yang dibuat oleh manajemen sebagai bentuk komitmen dalam pencapaian tujuan organisasi yang umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran merupakan alat manajemen dalam melakukan perkiraan penggunaan dana dengan efektif dan

efisien yang mempertimbangkan alternatif-alternatif tertentu bagi kebaikan dan keuntungan organisasi.

Analisis rasio keuangan terhadap realisasi anggaran merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan analisis kinerja keuangan ada beberapa rasio yang digunakan, diantaranya adalah rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan yang diterbitkan yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus kas, Catatan Atas Laporan Keuangan dan Laporan Operasional. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk dapat memberikan gambaran kinerja keuangan. Secara umum pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah berguna untuk mengetahui tingkat kinerja pengelolaan keuangan, dan tingkat kemandirian suatu daerah dengan melihat kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan daerah dibanding dengan kewajiban pemerintah dalam membiayai belanja daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Value for Money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. *Value for Money* yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi

masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif (Rahman, 2021). Melalui *value for money* diharapkan instansi dapat mengetahui, mengukur dan mengevaluasi kinerja dalam suatu periode tertentu dan meminimalisir pemborosan dan kebocoran dana. Dengan *value for money*, organisasi sektor publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.

Permasalahan yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh mengenai output (realisasi anggaran) dan input (jumlah anggaran belanja) pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Persentase Tingkat Penggunaan Anggaran Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2022

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)
2020	154.430.297.956	126.088.004.025	28.342.293.931	81,65%
2021	146.248.603.685	120.112.210.440	26.136.393.245	82,13%
2022	117.349.486.671	95.739.018.117	21.610.468.554	81,58%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh (2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan fenomena atau permasalahan yang terjadi yaitu jumlah anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuasi) sehingga hal ini menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Pada tahun 2020 jumlah anggaran belanja sebesar Rp154.430.297.956, pada tahun 2021 jumlah anggaran belanja sebesar Rp146.248.603.685 dan pada tahun 2022 jumlah anggaran belanja sebesar Rp117.349.486.671. Sisa anggaran pada setiap tahun termasuk besar karena mencapai

miliaran. Sisa anggaran dan tingkat persentase penggunaan anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuasi) yaitu sisa anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp28.342.293.931 dengan tingkat persentase 81,65%, sisa anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp26.136.393.245 dengan tingkat persentase 82,13%, dan sisa anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp21.610.468.554 dengan tingkat persentase 81,58%.

Hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Rasyidi (2021) menunjukkan bahwa kinerja berdasarkan metode *Value for money* dengan menggunakan teknik perhitungan rasio ekonomi selama tiga tahun menunjukkan kriteria sangat ekonomis yaitu mengalami peningkatan. Kinerja keuangan berdasarkan metode *Value for money* dengan menggunakan Teknik perhitungan rasio efisiensi selama tiga tahun mengalami peningkatan efisiensi meskipun terjadi fluktuasi. Kinerja keuangan berdasarkan metode *Value for money* dengan menggunakan teknik perhitungan rasio efektifitas selama tiga tahun terjadi fluktuasi. Kemudian hasil penelitian dari Rahman (2021) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada rasio ekonomis tahun 2017-2019 sudah baik, tetapi hasil dari rasio efisiensi dan rasio efektivitasnya belum dapat dikatakan sebagai kinerja yang efisiensi serta belum efektif.

Selain itu, hasil penelitian dari Mahbengi (2019) menyatakan bahwa dilihat dari kosep pengukuran *Value for money* kinerja pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah tahun 2011-2015 berdasarkan indikator rasio ekonomis tergolong kategori

ekonomis rasionya berada diantara 90-100%, rasio efisisensi tergolong katagori kurang efisisen rasionya berada diantara 90-10%, dan rasio efektivitas tergolong katagori efektif rasionya berada diantara 90-100%.

Faktor-faktor yang menyebabkan belum terwujudnya *value for money* adalah meningkatnya rasio ekonomis disebabkan karena meningkatnya belanja daerah yang di anggarkan dan yang terealisasi tapi perbandingan selisihnya tidak signifikan, meningkatnya rasio efisiensi disebabkan karena realisasi belanja dan realisasi pendapatan perbandingan selisihnya tidak signifikan, rasio efektivitas target belanja dan realisasi belanja mengalami peningkatan tetapi realiasi pendapatan tidak pernah mencapai bahkan melebihi target yang terealisasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “**Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2022**”.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah *value for money* dalam mengukur kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh tahun 2020-2022.

1.3. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis *value for money* dalam mengukur kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Menambahkan wawasan atau pengetahuan bagi penulis mengenai *value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh .
- b. Sebagai bahan masukan atau informasi serta bahan pertimbangan bagi kementerian dan kepada satuan kerja perangkat kota khususnya kinerja keuangan.

2. Manfaat Akademis

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai kinerja keuangan

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian dibatasi dengan *value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh dengan rasio yang digunakan yaitu rasio efisiensi dan rasio efektivitas tahun 2020-2022.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 *Value For Money*

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2019:57), *value for money* adalah indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Menurut Mahmudi (2019:98) *value for money* adalah konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi.

Menurut Mardiasmo (2018:128) *value for money* adalah suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Melalui *value for money* memberikan informasi berupa indikator apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakatnya.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa intangible output. Menurut Mahmudi (2019:83), menyatakan bahwa *Value for money* merupakan metode yang penting dalam organisasi sektor publik yang memiliki

pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengembangan indikator kinerja berpusat pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan atau yang dikenal dengan 3E, sebagai prinsip penting pengelolaan anggaran pemerintah yang ekonomis dengan meminimalkan input untuk menghindari pemborosan pengeluaran, efisiensi dengan mencapai output maksimal dengan input minimal dan efektif dengan mencapai target yang sudah ditetapkan.

Value for money merupakan metode pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mahmudi, 2015:83), dimana pengertian dari ketiga konsep tersebut adalah:

1. Ekonomi: konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit input. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah, yaitu harga yang mendekati harga pasar.
2. Efisiensi: efisien terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau istilah lain output per unit input.
3. Efektivitas: efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan.

Menurut Mardiasmo (2018:128) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Terdapat tiga indikator utama dalam *value for money*, yaitu sebagai berikut:

1. Ekonomi, yaitu pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input *value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sector public dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak efektif.

2. Efisiensi, yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Tuntutan masyarakat dalam *value for money* adalah ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam arti bahwa penggunaan/pengorbanannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. Menurut Mardiasmo (2018:127) indikator *value for money* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi). Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya output tertentu dapat dicapai dengan sumberdaya yang serendah-rendahnya (*spending well*).
2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*).

2.1.2 Kinerja

Menurut Mangkunegara (2018:67) istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Sedarmayanti (2019:87) pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja adalah merupakan suatu alat manajemen untuk bisa meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Hasibuan (2018:93) menyatakan bahwa "kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Menurut Winardi (2018:136) menyatakan bahwa "seorang manager yang bekerja ekstra lama di kantornya guna memenuhi kebutuhannya yang akan prestasi, mungkin merasa jam kerja ekstra tersebut berbenturan dengan kebutuhannya akan diafiliasi yang diekspresi dalam wujud keinginannya untuk berada ditengah-tengah keluarga".

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dicapai pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup organisasi. Dalam mencapai kinerja yang tinggi beberapa faktor yang mempengaruhi, menjadi pemicu apakah kinerja pegawai tinggi atau rendah.

2.1.3 Anggaran

Menurut Suparmoko (2018:145): "Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan dimasa yang akan datang". Berdasarkan pendapat Richard dalam Suparmoko (2018:145): "Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan

atau pendapatan di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan dimasa yang akan datang”.

Menurut Prawironegoro (2018:2) “Anggaran ialah rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi”. Menurut Mardiasmo (2018:45), Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. Menurut Anthony dan Govindarajan (2018:62) menyatakan bahwa “Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi”. Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun.

2.1.4 Kinerja Keuangan

Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada pengelolaan. Keuangan Daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurut Halim (2018;20) APBK adalah rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu ketika badan legislatif (DPRK) memberikan kredit kepada badan

eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rencana yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta dapat dijadikan milik daerah. Segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 32 menyatakan kinerja adalah keluaran/ hasil dari program/ kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut Halim (2018: 24), kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Keuangan daerah menurut Mamesah (Halim, 2018:23) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa yaang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

2.1.5 Rasio Ekonomi

Ekonomi adalah memperoleh sumber daya (input) tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input *value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Menurut Mardiasmo (2018:4) ekonomi merupakan memperoleh input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input *value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit input. Ekonomi adalah seluruh sumberdaya input diperoleh dengan harga yang lebih rendah (spending less) yaitu harga yang mendekati pasar. Ukuran ekonomi berupa anggaran yang dialokasikan. Pengertian ekonomi (hemat atau tepat guna) sering disebut juga kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (prudency) dan tidak ada pemborosan. Pemanfaatan sumberdaya di bawah anggaran menunjukkan adanya penghematan, sedangkan melebihi anggaran menunjukkan adanya pemborosan. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa seluruh sumber daya input tidak terjadi pemborosan. Mahmudi (2019:84) merumuskan efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Sangat ekonomis
2	90% – 100%	Ekonomis
3	80% – 90%	Cukup Ekonomis
4	60% – 80%	Kurang Ekonomis
5	< 60%	Tidak Ekonomis

Sumber : Mahmudi (2019:84)

2.1.6 Rasio Efisiensi

Menurut Mahmudi (2019:83) Efisiensi pengelolaan anggaran adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara *output* dan *input*. Menurut Bastian (2019:59) Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maximum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input*. Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan Efisiensi di ukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* di banding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Mardiasmo (2018:133) Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Menurut Halim (2018:234) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah

100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien. atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.

Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar rasio tersebut maka semakin efisien suatu organisasi. Mahmudi (2019:84) merumuskan efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Relisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Output : Keluaran yang dicapai dalam suatu program/kegiatan.

Input : Segala sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah program/kegiatan

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Tidak Efisien
2	90% – 100%	Kurang Efisien
3	80% – 90%	Cukup Efisien
4	60% – 80%	Efisien
5	< 60%	Sangat Efisien

Sumber : Mahmudi (2019:84)

2.1.7 Efektivitas

Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*. Menurut Mahmudi (2019: 86) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil).

Menurut Siagian (2018:24) Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Menurut Ahadi (2018:3). Efektifitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Suatu organisasi yang bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut.

Menurut Robbins (2019:8) Efektifitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran. Efektifitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan. Pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun.

Menurut Mardiasmo (2018:134) Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efektifitas selalu diartikan sebagai suatu penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga setinggi yang diharapkan. Menurut Mahmudi (2019: 86), Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mahmudi (2019:85) meremuskan efektifitas sebagai berikut;

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Target Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Sangat efektif
2	90% – 100%	Efektif
3	80% – 90%	CukupEfektif
4	60% – 80%	Kurang Efektif
5	< 60%	Tidak Efektif

Sumber :Mahmudi (2019:85)

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian dari Zenita (2022) dengan judul Analisis *Value for money* Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekan baru jika dilihat dari rasio ekonomis maka dapat disimpulkan jika selama 3 (tiga) tahun terakhir dikatakan ekonomis karena memiliki persentase rasio dibawah 100%. Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru jika dilihat dari rasio efisiensi maka dapat disimpulkan jika selama 2 tahun berturut-turut yang dinilai tidak efisiensi yaitu pada tahun 2018 dan 2019 dimana persentase rasio efektivitas pada tahun 2018. Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020 dikatakan

efektif karena memiliki rasio efektivitas diatas 100% yang artinya pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mampu melaksanakan anggaran dengan pencapaian maksimal.

Rasyidi (2021) dengan judul Analisis *Value for money* Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan metode *Value for money* dengan menggunakan teknik perhitungan rasio ekonomi selama tiga tahun menunjukkan kriteria sangat ekonomis yaitu mengalami peningkatan. Kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan metode *Value for money* dengan menggunakan teknik perhitungan rasio efisiensi selama tiga tahun mengalami peningkatan efisiensi meskipun terjadi fluktuasi. 3 Kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan metode *Value for money* dengan menggunakan teknik perhitungan rasio efektivitas selama tiga tahun terjadi fluktuasi.

Penelitian dari Munandar (2021) dengan judul Analisis *Value for money* Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019. Hasilnya penelitian ditinjau dari tingkat ekonomis adalah bahwa pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 Pemerintah Kota Surabaya berhasil mencapai tingkat ekonomis kinerja antara 80% sampai 90% dengan kriteria cukup ekonomis. Kondisi tahun 2019 meningkat menjadi 92,24% yang berarti tingkat ekonomisnya menurun menjadi kategori kurang ekonomis. Dari segi efisiensi hasil

penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kurang efisien pada tahun 2015 dan tahun 2019 dan tidak efisien pada tahun 2016, 2018 dan 2019. Rata-rata tingkat efisiensi selama 5 tahun adalah 101.18% yang artinya masuk kategori tidak efisien. Hasil perhitungan tingkat efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya pada tahun 2015 adalah efektif sebesar 99.65%, sedangkan untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 masuk dalam kategori sangat efektif yaitu berkisar antara 100.37% sampai dengan 101.63%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya dapat dikatakan sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan dengan tingkat efektivitas rata-rata adalah sebesar 100.88%.

Rahman (2021) dengan judul *Analisis Value for money* Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau pada Rasio Ekonomis tahun 2017-2019 sudah baik, tetapi hasil dari Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitasnya belum dapat dikatakan sebagai kinerja yang efisien serta belum efektif.

Mahbengi (2019) dengan judul *Analisis Value for money* Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dilihat dari kosep pengukuran *Value for money* kinerja pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah tahun 2011-2015 berdasarkan indikator rasio ekonomis tergolong katagori ekonomis rasionya berada

diantara 90-100%, rasio efisisensi tergolong kategori kurang efisien rasionya berada diantara 90-10%, dan rasio efektivitas tergolong kategori efektif rasionya berada diantara 90-100%. Faktor-faktor yang menyebabkan belum terwujudnya *value for money* adalah meningkatnya rasio ekonomis disebabkan karena meningkatnya belanja daerah yang di anggarkan dan yang terealisasi tapi perbandingan selisihnya tidak signifikan, meningkatnya rasio efisiensi disebabkan karena realisasi belanja dan realisasi pendapatan perbandingan selisihnya tidak signifikan, rasio efektivitas target belanja dan realisasi belanja mengalami peningkatan tetapi realisasi pendapatan tidak pernah mencapai bahkan melebihi target yang terealisasi. Dampak dari pengukuran dengan *value for money* terhadap APBD pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah adalah terhadap penyusunan APBD tahun selanjutnya.

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama Peneliti	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis <i>Value for money</i> Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (Zenita, 2022)	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru jika dilihat dari rasio ekonomis maka dapat disimpulkan jika selama 3 (tiga) tahun terakhir dikatakan ekonomis karena memiliki persentase rasio dibawah 100%. Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru jika dilihat dari rasio efisiensi maka dapat disimpulkan jika selama 2 tahun berturut-turut yang dinilai tidak efisien yaitu pada tahun 2018 dan 2019 dimana persentase rasio efektivitas pada	Menggunakan rasio ekonomi, efektivitas dan efisiensi	Lokasi penelitian dan tahun atau periode penelitian

			tahun 2018. Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020 dikatakan efektif karena memiliki rasio efektivitas diatas 100%.		
--	--	--	---	--	--

Lanjutan Tabel 2.4

No	Judul dan Nama Peneliti	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Analisis <i>Value for money</i> Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo (Rasyidi, 2021)	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan metode <i>Value for money</i> dengan menggunakan teknik perhitungan rasio ekonomi selama tiga tahun menunjukkan kriteria sangat ekonomis yaitu mengalami peningkatan. Kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan metode <i>Value for money</i> dengan menggunakan teknik perhitungan rasio efisiensi selama tiga tahun mengalami peningkatan efisiensi meskipun terjadi fluktuasi. Berdasarkan metode <i>Value for money</i> dengan menggunakan teknik perhitungan rasio efektifitas selama tiga tahun terjadi fluktuasi.	Menggunakan rasio ekonomi, efektivitas dan efisiensi	Lokasi penelitian dan tahun atau periode penelitian
3	Analisis <i>Value for money</i> Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya	Penelitian kualitatif	Hasilnya penelitian ditinjau dari tingkat ekonomis adalah bahwa pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 Pemerintah Kota Surabaya berhasil mencapai tingkat ekonomis kinerja antara 80% sampai 90% dengan kriteria cukup ekonomis. Kondisi tahun 2019 meningkat menjadi 92,24% yang berarti tingkat	Menggunakan rasio ekonomi, efektivitas dan efisiensi	Lokasi penelitian dan tahun atau periode penelitian

	Tahun Anggaran 2015-2019 (Munandar, 2021)		ekonomisnya menurun menjadi kategori kurang ekonomis. Dari segi efisiensi hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kurang efisien pada tahun 2015 dan tahun 2019 dan tidak efisien pada tahun 2016, 2018 dan 2019.		
--	---	--	---	--	--

Lanjutan Tabel 2.4

No	Judul dan Nama Peneliti	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Analisis <i>Value for money</i> Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau (Rahman, 2021)	Penelitian kualitatif	Hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau pada Rasio Ekonomis tahun 2017-2019 sudah baik, tetapi hasil dari Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitasnya belum dapat dikatakan sebagai kinerja yang efisien serta belum efektif.	Menggunakan rasio ekonomi, efektivitas dan efisiensi	Lokasi penelitian dan tahun atau periode penelitian
5	Analisis <i>Value for money</i> Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah (Mahbengi, 2019)	Penelitian kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dilihat dari konsep pengukuran <i>Value for money</i> kinerja pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah tahun 2011-2015 berdasarkan indikator rasio ekonomis tergolong kategori ekonomis rasionya berada diantara 90-100% rasio efisiensi tergolong kategori kurang efisien rasionya berada diantara 90-10%, dan rasio efektivitas tergolong kategori efektif rasionya berada diantara 90-100%.	Menggunakan rasio ekonomi, efektivitas dan efisiensi	Lokasi penelitian dan tahun atau periode penelitian

Sumber: Data diolah, 2022

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam rangka memperoleh hasil pengukuran yang objektif dan menyeluruh mencakup aspek yang bersifat tangible maupun intangible maka metode pengukuran kinerja harus didesain sedemikian rupa agar bisa representatif selain juga *applicable*. Ada beberapa alat dalam pengukuran kinerja, antara lain menggunakan metode *Balance Score Card* dan metode *Value for Money*. Dalam metode *Balance Score Card* terdapat empat perspektif yang dinilai yaitu perspektif keuangan (*financial*), perspektif konsumen (*customer*), perspektif proses bisnis/intern (*internal*), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*growth and learn*), sedangkan dengan metode *Value for Money* terdapat tiga elemen utama yang dinilai yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2018:77).

Value for Money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. *Value for Money* yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif (Rasyidi, 2021).

1. Ekonomi terkait analisis sejauh mana organisasi sector public dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

2. Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pencapaian output yang maksimum dengan input yang terendah menunjukkan efisiensi.
3. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2019:152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen yaitu; tujuan penelitian, jenis penelitian, tingkat investasi penelitian, horizon waktu dan unit analisis. Penelitian deskriptif ini untuk mendapatkan informasi mengenai hasil pengukuran kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh dengan menggunakan analisis *Value For Money*.

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur *value for money* dalam kinerja keuangan menggunakan analisis *Value For Money* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh tahun 2020-2022. Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh. Objek penelitian yang akan diteliti adalah Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh tahun 2020-2022.

3.1.2 Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dirumuskan, maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Husein Umar (2019:142) penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, serta menginterpretasikan kondisi-kondisi yang mengungkapkan atau menggambarkan secara tepat hal-hal yang sedang dihadapi sekarang. Informasi yang telah diperoleh, selanjutnya dilengkapi dengan perubahan dari penulis sendiri, pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Penelitian deskriptif ini merupakan penyidikan yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan akhirnya menarik kesimpulan.

3.1.3 Tingkat Intervensi Peneliti

Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal dengan melakukan penelitian pengukuran kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh tahun 2020-2022. Tanpa mengintervensi *Analisis Value For Money*.

3.1.4 Horison Waktu

Menurut Sugiyono (2019:6) deret waktu (*time series*) adalah serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Analisis time series mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu (misalnya minggu, bulan, tahun) yang teratur. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa pola lama akan

terulang. Sejalan dengan berlangsungnya perubahan waktu. Peneliti mungkin ingin mempelajari fenomena pada lebih dari satu batas waktu dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yaitu 2020- 2022.

3.1.5 Unit Analisis

Data yang dikumpulkan secara individual digunakan untuk menghitung unit analisis pada tingkat agregasi yang lebih besar. Karakteristik tingkat analisis yaitu bahwa tingkat yang lebih rendah termaksud dalam tingkat yang lebih tinggi. Sifat informasi yang dikumpulkan serta tingkat di mana data dijumlahkan untuk analisis, adalah integral dengan keputusan yang dibuat dalam memilih unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh .

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan sumber di mana data dapat diperoleh peneliti. Dalam memilih sumber data, peneliti harus benar-benar berfikir mengenai kemungkinan kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan juga validitasnya. Menurut Sutopo (2018:56), ”Pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau kedalaman informasi yang diperoleh”. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara data sekunder dan data primer.

1. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019:147) data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dilaporkan dan dikumpulkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instransi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.

2. Data Primer

Menurut Sugiyono (2019:147) data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Sederhananya, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.

Pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara studi dokumentasi yaitu sebuah tulisan yang memuat informasi. Mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh seperti dokumen mengenai profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh, data laporan keuangan dan lainnya.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:15) penelitian kualitatif adalah “suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan

sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu metode analisis yang membandingkan tinjauan teoritis dengan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi saran” Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja melalui *value for money* yang dikembangkan dalam keuangan Mardiasmo (2018) adalah sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomi

Rasio ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan *input value*. Input dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan *input value* adalah realisasi anggaran. Mahmudi (2019:84) merumuskan efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Sangat ekonomis
2	90% – 100%	Ekonomis
3	80% – 90%	Cukup Ekonomis
4	60% – 80%	Kurang Ekonomis
5	< 60%	Tidak Ekonomis

Sumber :Mahmudi (2019:84)

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar rasio tersebut maka semakin efisien suatu organisasi. Mahmudi (2019:84) merumuskan efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Relisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Output : Keluaran yang dicapai dalam suatu program/kegiatan.

Input : Segala sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah program/kegiatan

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Tidak Efisien
2	90% – 100%	Kurang Efisien
3	80% – 90%	Cukup Efisien
4	60% – 80%	Efisien
5	< 60%	Sangat Efisien

Sumber : Mahmudi (2019:84)

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mahmudi (2019:85) merumuskan efektifitas sebagai berikut;

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Sangat efektif
2	90% – 100%	Efektif
3	80% – 90%	Cukup Efektif
4	60% – 80%	Kurang Efektif
5	< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019:85)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh beralamat di jalan Prof. Ali Hasyimi Pango Banda Aceh, Email: Pupr.bna@gmail.com. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh merupakan unsur pelaksana teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Banda Aceh. Sebagai salah satu lembaga teknis daerah dan memiliki tanggung jawab membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pemenuhan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur Kota Banda Aceh. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan, pelaksanaan kebijakan pembangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, pelaksanaan kebijakan peningkatan tenaga ahli konstruksi, pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Kota Banda Aceh

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh adalah “Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Menuju Kota Banda Aceh Gemilang.” Sedangkan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh :

1. Menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman sehingga aparatur pemerintah dapat memberikan pelayanan optimal.
2. Menciptakan perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang baik.
3. Meningkatkan aksesibilitas kawasan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan prasarana jaringan jalan dan jembatan.
4. Memfungsikan jalan/jembatan, drainase dan bangunan air, sanitasi, bangunan perkantoran pemerintah seoptimal mungkin dengan melakukan pemeliharannya secara rutin maupun secara periodik/berkala.
5. Menyusun dan melaksanakan arahan dalam kebijakan tata ruang dan tata bangunan, menjaga dan melestarikan Kawasan Kota Pusaka (*Heritage*) dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau.
6. Melaksanakan sistem dan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terpadu, efektif, dan efisien melalui aparatur yang profesional.

7. Menyediakan tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat terutama masyarakat golongan menengah kebawah.
8. Mewujudkan *Water Front City* (infrastruktur, sosialisasi, payung hukum dan kelembagaan).

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh

Susunan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan
4. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
5. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum, yang membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Sarana Prasarana Air Limbah
 - 3) Seksi Pengembangan Air Minum
6. Bidang Sumber Daya Air, yang membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase dan Pengamanan Pantai

- 3) Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pengendalian Banjir
- 7. Bidang Bina Marga, yang membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi
 - 2) Seksi pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - 3) Seksi Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan Jalan
- 8. Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi, yang membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Konstruksi Bangunan
 - 2) Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Bangunan
 - 3) Seksi Jasa Konstruksi
- 9. Bidang Tata Ruang, yang membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan Pengaturan dan Pembinaan
 - 2) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - 3) Seksi Survei dan Pemetaan
- 10. UPTD Peralatan dan Laboratorium

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Rasio Ekonomi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh

Rasio ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan *input value*. Input dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan *input value* adalah realisasi anggaran. Untuk mengetahui tingkat rasio ekonomi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh digunakan rumus:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Perhitungan rasio ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Rasio ekonomianggaran belanja dan realisasi belanjaDinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh tahun2020

$$\text{Rasio Ekonomi tahun 2020} = \frac{126.088.004.025}{154.430.297.956} \times 100 = 81,65\%$$

- b. Rasio ekonomianggaran belanja dan realisasi belanjaDinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh tahun2021

$$\text{Rasio Ekonomi tahun 2021} = \frac{120.112.210.440}{146.248.603.685} \times 100 = 82,13\%$$

- c. Rasio ekonomianggaran belanja dan realisasi belanjaDinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh tahun2022.

$$\text{Rasio Ekonomi tahun 2022} = \frac{95.793.018.117}{117.349.486.671} \times 100 = 81,63\%$$

Dari perhitungan rumus rasio ekonomi dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Hasil Rasio Ekonomi padaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2022

No	Tahun	anggaran belanja (Rp)	Realisasi belanja (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5 = (4:3) x 100
2	2020	154.430.297.956	126.088.004.025	81,65%
3	2021	146.248.603.685	120.112.210.440	82,13%
4	2022	117.349.486.671	95.793.018.117	81,63%

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2023

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh sebesar Rp146.248.603.685 dan realisasi belanja sebesar Rp120.112.210.440 dengan tingkat rasio ekonomi sebesar 82,13% dan pada tahun 2022 anggaran belanjaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh sebesar

Rp117.349.486.671 dan realisasi belanja sebesar Rp95.793.018.117 dengan tingkat rasio ekonomi sebesar 81,63%. Pada tahun 2020 anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh sebesar Rp154.430.297.956 dan realisasi belanja sebesar Rp 126.088.004.025 dengan tingkat rasio ekonomi sebesar 81,65%.

4.2.2 Rasio Efisiensi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh

Analisis selanjutnya adalah efisiensi kinerja pengelolaan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh dengan membandingkan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Cara mengukur tingkat efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan biaya pengeluaran dengan realisasi atas pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Pengukuran tingkat efisiensi performa keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi realisasi pendapatan dan realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh tahun 2020

$$\text{Rasio Efisiensi tahun 2020} = \frac{126.088.004.025}{1.437.481.000} \times 100 = 8771,45\%$$

- b. Efisiensi realisasi pendapatan dan realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh tahun 2021

$$\text{Rasio Efisiensi tahun 2021} = \frac{120.112.210.440}{1.743.481.000} \times 100 = 6889,22\%$$

- c. Efisiensi realisasi pendapatan dan realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh tahun 2022

$$\text{Rasio Efisiensi tahun 2022} = \frac{95.793.018.117}{2.938.430.582} \times 100 = 3260,01\%$$

Dari perhitungan rumus efisiensi dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Hasil Rasio Efisiensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kota Banda Aceh Tahun 2020-2022

No	Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi belanja (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5 = 4:3 x 100
2	2020	1.437.481.000	126.088.004.025	8771,45%
3	2021	1.743.481.000	120.112.210.440	6889,22%
4	2022	2.938.430.582	95.793.018.117	3260,01%

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2023

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 realisasi pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh sebesar Rp2.938.430.582 dan realisasi belanja sebesar Rp95.793.018.117 dengan tingkat rasio efisiensi sebesar 3260,01%. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh sebesar Rp1.743.481.000 dan realisasi belanja sebesar Rp120.112.210.440 dengan tingkat rasio efisiensi sebesar 6889,22%. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh sebesar Rp1.437.481.000 dan realisasi belanja sebesar Rp126.088.004.025 dengan tingkat rasio efisiensi sebesar 8771,45%. Tingkat efisiensi kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh tahun 2020- 2022 berada pada kategori tidak efisien, yang rata-rata tingkat efisiensi selama 3 tahun adalah 6306,89% yang artinya masuk kategori tidak efisien.

4.2.3 Rasio Efektivitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh

Dalam analisis efektivitas kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh akan dijelaskan dengan cara merasiokan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Kota Banda Aceh tahun 2020

$$\text{Rasio Efektivitas tahun 2020} = \frac{1.437.481.000}{5.317.867.856} \times 100 = 27,03\%$$

- b. Efektivitas pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Kota Banda Aceh tahun 2021

$$\text{Rasio Efektivitas tahun 2021} = \frac{1.743.481.000}{10.865.462.736} \times 100 = 16,05\%$$

- c. Efektivitas pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Kota Banda Aceh tahun 2022

$$\text{Rasio Efektivitas tahun 2022} = \frac{2.938.430.582}{9.200.000.000} \times 100 = 31,94\%$$

Dari perhitungan rumus Efektivitas tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel

4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Hasil Rasio Efektivitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2022

No	Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Sisa Pendapatan	Persentase (%)
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = (4:3)x100
2	2020	5.317.867.856	1.437.481.000	3.880.386.856	27,03%
3	2021	10.865.462.736	1.743.481.000	9.121.981.736	16,05%
4	2022	9.200.000.000	2.938.430.582	6.261.569.418	31,94%

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2023

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 anggaran pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh sebesar Rp5.317.867.856 dan realisasi pendapatan sebesar Rp1.437.481.000 dengan tingkat rasio efektivitas sebesar 27,03%. Tahun 2021 anggaran pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh sebesar Rp10.865.462.736 dan realisasi pendapatan sebesar Rp1.743.481.000 dengan tingkat rasio efektivitas sebesar 16,05%. Tahun 2022 anggaran pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh sebesar Rp9.200.000.000 dan realisasi pendapatan sebesar Rp 2.938.430.582 dengan tingkat rasio efektivitas sebesar 31,94%.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis dan Pembahasan Rasio Ekonomi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh

Anggaran belanja dan realisasibelanjaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh tahun 2020- 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2022

No	Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase	Kategori
1	2	3	4	$5 = 4:3 \times 100$	5
2	2020	154.430.297.956	126.088.004.025	81,65%	Cukup Ekonomis
3	2021	146.248.603.685	120.112.210.440	82,13%	Cukup Ekonomis
4	2022	117.349.486.671	95.793.018.117	81,63%	Cukup Ekonomis

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2023

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh sebesar Rp154.430.297.956 dan realisasi belanja sebesar Rp126.088.004.025 dengan tingkat rasio ekonomis sebesar 81,65%, artinya kemampuan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh dapat dikatakan cukup ekonomis melakukan penghematan anggaran belanja dan berada pada tingkat persentase antara 80% sampai dengan 90%.
2. Pada tahun 2021 anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh sebesar Rp146.248.603.685 dan realisasi belanja sebesar Rp120.112.210.440 dengan tingkat rasio ekonomis sebesar 82,13%, artinya kemampuan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Acehdikatakan cukup ekonomis karena tingkat rasio ekonomis sebesar antara 80% sampai dengan 90%.

3. Pada 2022 anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh sebesar Rp117.349.486.671 dan realisasi belanja sebesar Rp95.793.018.117 dengan tingkat pingkat rasio ekonomis 81,63%, artinya kemampuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh dikatakan cukup ekonomis karena tingkat persentase antara 80% sampai dengan 90%.

4.3.2 Analisis dan Pembahasan Rasio Efisiensi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh

Analisis Efisiensi kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh tahun 2020-2022 akan dijelaskan dengan cara merasiokan realisasi pendapatan dan realisasi belanjadengan rincian sesuai Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2022

No	Tahun	RealisasiPendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase	Kemampuan Keuangan
1	2	3	4	$5 = 4 : 3 \times 100$	6
2	2020	1.437.481.000	126.088.004.025	8771,45%	Tidak efisien
3	2021	1.743.481.000	120.112.210.440	6889,22%	Tidak efisien
4	2022	2.938.430.582	95.793.018.117	3260,01%	Tidak efisien

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2023

Berdasarkan Tabel 4.5dapat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh sebesar Rp1.437.481.000 dan realisasi belanja sebesar Rp126.088.004.025 dengan tingkat rasio efisiensi sebesar 8771,45%, artinya kemampuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota

Banda Aceh dalam mengelola keuangan dikatakan tidak efisien karena tingkat persentase di atas 100%

2. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh sebesar Rp1.743.481.000 dan realisasi belanja sebesar Rp120.112.210.440 dengan tingkat rasio efisiensi sebesar 6889,22%, artinya kemampuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh dalam mengelola keuangan dikatakan tidak efisien karena tingkat persentase di atas 100%
3. Pada 2022 realisasi pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh sebesar Rp2.938.430.582 dan realisasi belanja sebesar Rp95.793.018.117 dengan tingkat rasio efisiensi sebesar 3260,01%, artinya kemampuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh dalam mengelola keuangan dikatakan tidak efisien karena tingkat persentase di atas 100%

Ketidakefisienan kinerja pengelolaan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh disebabkan karena pengadaan barang/jasa yang melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan standar dan adanya pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga pada saat penyusunan anggaran. Penyebab lainnya ketidakefisienan kinerja pengelolaan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh diakibatkan kurang perencanaan dan penganggaran program/kegiatan atau belanja serta keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pengelolaan keuangan tidak efisien.

4.3.3 Analisis dan Pembahasan Rasio Efektivitas pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh

Analisis rasio efektivitas kinerja pengelolaan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2022 dapat dijelaskan dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan dan dapat ditunjukkan pada Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Realisasi dan Anggaran Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2022

No	Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Kurang/Lebih(Rp)	Persentase	Kategori
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = (4:3) x 100	7
2	2020	5.317.867.856	1.437.481.000	3.880.386.856	27,03%	Tidak Efektif
3	2021	10.865.462.736	1.743.481.000	9.121.981.736	16,05%	Tidak Efektif
4	2022	9.200.000.000	2.938.430.582	6.261.569.418	31,94%	Tidak Efektif

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2023

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh sebesar Rp1.437.481.000 dan anggaran pendapatan sebesar Rp5.317.867.856 dengan tingkat rasio efektivitas sebesar 27,03%, dengan sisa anggaran sebesar Rp3.880.386.856 yang tidak dicapai, artinya kemampuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh dalam mengelola keuangan dikatakan tidak efektif karena tingkat persentase di bawah 60%
2. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh sebesar Rp1.743.481.000 dan anggaran

pendapatan sebesar Rp10.865.462.736 dengan tingkat rasio efektivitas sebesar 16,05%, dengan sisa anggaran sebesar Rp9.121.981.736 yang tidak dicapai, artinya kemampuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh dalam mengelola keuangan dikatakan tidak efektif karena tingkat persentase di bawah 60%.

3. Pada tahun 2022 realisasi pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh sebesar Rp2.938.430.582 dari anggaran pendapatan sebesar Rp9.200.000.000 dengan tingkat rasio efektivitas sebesar 31,94%, dengan sisa anggaran sebesar Rp6.261.569.418 yang tidak dicapai, artinya kemampuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh dalam mengelola keuangan dikatakan tidak efektif karena tingkat persentase di bawah 60%

Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh tidak efektif dalam pengelolaan pendapatan dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 25 % dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2022.

Untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh dapat dilakukan dengan cara tetap memperhatikan faktor-faktor keefisienan, keefektifan dan keekonomisan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran. Dalam proses menyusun rencana anggaran pendapatan harus mempertimbangkan tingkat kemampuan untuk mencapai realisasi pendapatan tersebut. Selain itu juga, peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengarahan sesuai dengan tujuan dan fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada publik. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh dan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan pembangunan infrastruktur di Kota Banda Aceh.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan dengan menggunakan metode *value for money* dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan rasio ekonomi bahwa anggaran dan realisasi belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh tahun 2020-2022 dapat dikatakan cukup ekonomis.
 - b. Berdasarkan rasio efisiensi bahwa realisasi belanja dan pendapatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh tahun 2020-2022 dapat dikatakan tidak efisien.
 - c. Berdasarkan rasio efektivitas bahwa anggaran dan realisasi pendapatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh pada tahun 2020-2022 dapat dikatakan tidak efektif.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh agar mampu melakukan penghematan anggaran belanja.

2. Disarankan kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh untuk melakukan penghematan realisasi belanja dan beberapa sub belanja lainnya agar penggunaan anggaran lebih terarah dan bermanfaat bagi instansi pemerintah maupun bagi masyarakat.
3. Disarankan kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh agar mampu terus meningkatkan capaian realisasi pendapatan dan juga dapat merencanakan anggaran pendapatan lebih proporsional dengan mempertimbangkan kuantitas wajib retribusi dan kemampuan pencapaian target pendapatan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ayuningtyas, Hertianti. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Bastian, Indra. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: FE UGM.
- Halim, Abdul (2018). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta*
- Husein Umar. 2002. *Metode Riset Bisnis: Panduan Mahasiswa Untuk Melaksanakan Riset Dilengkapi Contoh Proposal Dan Hasil Riset Bidang Manajemen Dan Akuntansi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Mahbengi, Syahri. (2019). Analisis Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 1 (1), 1-13
- Mahmudi. (2019). *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit. STIM YPKN.
- Mangkunegara AA. Anwar Prabu. (2018). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: rafika ADITAMA
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Munandar, Agus. (2021). Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5 (3), 1-14
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 32
- Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh
- Prawironegoro, Darsono. (2018). *Akuntansi Manajemen*. Edisi Dua. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rahman, Winia. (2021). Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1 (1), 1-17.
- Rasyidi, Ali. (2021). Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Surabaya*, 1 (1), 1-12.
- Sedarmayanti. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sekaran, Uma, dan Roger Bougie (2019). *Metode Penelitian untuk Bisnis Jakarta* : Edisi Keenam. Salemba Empat
- Siagian, S. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko. (2018). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Edisi Kedua*. Yogyakarta.
- Susilo, Y Sri (2018) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutopo, A. H. (2018). *Terampil Mengolah Data. Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta : Prenada.
- Winardi, J. (2018). *Manajemen Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**

No	uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = 4/3*100%
1	PENDAPATAN DAERAH	5.317.867.856	1.437.481.000	3.880.386.856	27,03%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	365.462.736	109.340.000	256.122.736	29,92%
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.952.405.120	1.328.141.000	3.624.264.120	26,82%
1	BELANJA DAERAH	154.430.297.956	126.088.004.025	28.342.293.931	81,65%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.218.423.868	7.646.674.220	(428.250.352)	105,93%
	Belanja Pegawai	7.218.423.868	7.646.674.220	(428.250.352)	105,93%
	Gaji dan Tunjangan	4.412.377.721	4.943.737.965	(531.360.244)	112,04%
	Tambahan Penghasilan PNS	2.806.046.147	2.702.936.255	103.109.892	96,33%
2	BELANJA LANGSUNG	147.211.874.088	118.441.329.805	28.770.544.283	80,46%
	Belanja Pegawai	1.489.280.000	1.312.260.000	177.020.000	88,11%
	Honorarium PNS	456.950.000	431.175.000	25.775.000	94,36%
	Honorarium Non PNS	1.032.330.000	881.085.000	151.245.000	85,35%
	Belanja Barang dan Jasa	70.880.019.665	57.073.504.155	13.806.515.510	80,52%
	Belanja Bahan Pakai Habis	583.903.400	383.888.300	200.015.100	65,75%
	Belanja Jasa Kantor	1.194.280.000	1.065.842.517	128.437.483	89,25%
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	295.300.000	248.012.662	47.287.338	83,99%
	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.439.700	69.647.300	14.792.400	82,48%
	Belanja Makanan dan Minuman	189.319.250	135.999.750	53.319.500	71,84%
	Belanja Pakaian Kerja	12.650.000	12.650.000	-	100,00%
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	190.000.000	117.462.026	72.537.974	61,82%
	Belanja Pemeliharaan	37.761.338.815	30.207.121.000	7.554.217.815	79,99%
	Belanja Jasa Konsultasi	5.349.262.500	2.971.537.500	2.377.725.000	55,55%
	Belanja Hibah Barang atau Jasa	25.219.526.000	21.861.343.100	3.358.182.900	86,68%
	Belanja Modal	74.842.574.423	60.055.565.650	14.787.008.773	80,24%
	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah dan Publik	2.240.000.000	2.221.625.999	18.374.001	99,18%
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	6.000.000	5.886.201	113.799	98,10%
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000	4.720.000	280.000	94,40%
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.500.000	8.735.000	1.765.000	83,19%
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	45.000.000	43.850.000	1.150.000	97,44%
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	13.000.000	12.700.000	300.000	97,69%
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	15.727.053.769	8.631.932.000	7.095.121.769	54,89%
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	4.030.000.000	4.028.639.000	1.361.000	99,97%
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	41.750.720.654	37.347.421.800	4.403.298.854	89,45%
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	11.015.300.000	7.750.055.650	3.265.244.350	70,36%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANDA ACEH
TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

No	uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = 4/3*100%
1	PENDAPATAN DAERAH	5.317.867.856	1.437.481.000	3.880.386.856	27,03%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	365.462.736	109.340.000	256.122.736	29,92%
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.952.405.120	1.328.141.000	3.624.264.120	26,82%
1	BELANJA DAERAH	154.430.297.956	126.088.004.025	28.342.293.931	81,65%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.218.423.868	7.646.674.220	(428.250.352)	105,93%
	Belanja Pegawai	7.218.423.868	7.646.674.220	(428.250.352)	105,93%
2	BELANJA LANGSUNG	147.211.874.088	118.441.329.805	28.770.544.283	80,46%
	Belanja Pegawai	1.489.280.000	1.312.260.000	177.020.000	88,11%
	Belanja Barang dan Jasa	70.880.019.665	57.073.504.155	13.806.515.510	80,52%
	Belanja Modal	74.842.574.423	60.055.565.650	14.787.008.773	80,24%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANDA ACEH
TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

No	uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = 4/3*100%
II	PENDAPATAN DAERAH	10.865.462.736,00	1.743.481.000,00	9.121.981.736,00	16,05%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	365.462.736,00	70.070.000,00	295.392.736,00	19,17%
2	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.500.000.000,00	1.673.411.000,00	8.826.589.000,00	15,94%
II	BELANJA DAERAH	146.248.603.685,00	120.112.210.440,89	26.136.393.244,11	82,13%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.512.395.728,00	9.275.433.335,00	236.962.393,00	97,51%
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.811.440.250,00	10.226.651.000,00	584.789.250,00	94,59%
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	21.279.720.700,00	18.396.525.836,80	2.883.194.863,20	86,45%
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	572.005.254,00	196.131.000,00	375.874.254,00	34,29%
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.481.149.000,00	3.345.038.500,00	1.136.110.500,00	74,65%
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	26.823.126.714,00	21.985.317.943,24	4.837.808.770,76	81,96%
7	Program Penataan Bangunan Gedung	28.666.017.562,00	23.623.840.886,91	5.042.176.675,09	82,41%
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	14.614.825.215,00	9.751.954.558,94	4.862.870.656,06	66,73%
9	Program Penyelenggaraan Jalan	28.844.380.262,00	22.779.321.380,00	6.065.058.882,00	78,97%
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	643.543.000,00	531.996.000,00	111.547.000,00	82,67%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANDA ACEH
TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

No	uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = 4/3*100%
II	PENDAPATAN DAERAH	9.200.000.000,00	2.938.430.582,25	6.261.569.417,75	31,94%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00	206.433.000,00	(6.433.000,00)	103,22%
2	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	9.000.000.000,00	2.731.997.582,25	6.268.002.417,75	30,36%
II	BELANJA DAERAH	117.349.486.671,00	95.793.018.117,99	21.556.468.553,01	81,63%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.118.390.517,00	9.801.922.932,00	316.467.585,00	96,87%
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	594.815.472,00	305.115.500,00	289.699.972,00	51,30%
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.616.455.528,00	6.769.434.000,00	847.021.528,00	88,88%
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	408.240.009,00	406.240.000,00	2.000.009,00	99,51%
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.204.208.168,00	4.951.417.800,00	252.790.368,00	95,14%
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	20.405.565.357,00	14.955.588.683,00	5.449.976.674,00	73,29%
7	Program Penataan Bangunan Gedung	9.991.427.139,00	9.115.460.378,00	875.966.761,00	91,23%
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	25.022.812.350,00	13.778.669.683,99	11.244.142.666,01	55,06%
9	Program Penyelenggaraan Jalan	37.359.042.752,00	35.672.749.813,00	1.686.292.939,00	95,49%
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	628.529.379,00	36.419.328,00	592.110.051,00	5,79%

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

Urusan Pemerintahan : 1.03. - PEKERJAAN UMUM

Unit Organisasi : 1.03.02. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Halaman : 1

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
	PENDAPATAN DAERAH	5.317.867.856,00	1.437.481.000,00	3.880.386.856,00	27,03	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.317.867.856,00	1.437.481.000,00	3.880.386.856,00	27,03	
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	5.317.867.856,00	1.437.481.000,00	3.880.386.856,00	27,03	
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	365.462.736,00	109.340.000,00	256.122.736,00	29,92	
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	365.462.736,00	109.340.000,00	256.122.736,00	29,92	
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	4.952.405.120,00	1.328.141.000,00	3.624.264.120,00	26,82	
4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.952.405.120,00	1.328.141.000,00	3.624.264.120,00	26,82	
	JUMLAH	5.317.867.856,00	1.437.481.000,00	3.880.386.856,00	27,03	
	BELANJA	154.430.297.956,00	126.088.004.025,00	28.342.293.931,00	81,65	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.218.423.868,00	7.646.674.220,00	(428.250.352,00)	105,93	
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	7.218.423.868,00	7.646.674.220,00	(428.250.352,00)	105,93	
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.412.377.721,00	4.943.737.965,00	(531.360.244,00)	112,04	
5.1.1.01.01.	Gaji pokok PNS/uang representasi	3.372.172.834,00	3.763.285.180,00	(391.112.346,00)	111,60	
5.1.1.01.02.	Tunjangan keluarga	358.002.012,00	392.339.858,00	(34.337.846,00)	109,59	
5.1.1.01.03.	Tunjangan jabatan	202.707.143,00	223.665.000,00	(20.957.857,00)	110,34	
5.1.1.01.05.	Tunjangan fungsional umum	138.301.429,00	153.100.000,00	(14.798.571,00)	110,70	
5.1.1.01.06.	Tunjangan beras	204.633.056,00	221.243.100,00	(16.610.044,00)	108,12	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	1.287.789,00	3.813.122,00	(2.525.333,00)	296,10	
5.1.1.01.08.	Pembulatan gaji	59.118,00	52.423,00	6.695,00	88,68	
5.1.1.01.09.	Iuran asuransi kesehatan	104.841.588,00	155.607.980,00	(50.766.392,00)	148,42	
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	7.593.186,00	8.927.406,00	(1.334.220,00)	117,57	
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kematian	22.779.566,00	21.703.896,00	1.075.670,00	95,28	
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.806.046.147,00	2.702.936.255,00	103.109.892,00	96,33	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
5.1.1.02.01.	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	35.200.000,00	31.118.545,00	4.081.455,00	88,40	
5.1.1.02.05.	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	2.770.846.147,00	2.671.817.710,00	99.028.437,00	96,43	
	BELANJA LANGSUNG	147.211.874.088,00	118.441.329.805,00	28.770.544.283,00	80,46	
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.489.280.000,00	1.312.260.000,00	177.020.000,00	88,11	
5.2.1.01.	Honorarium PNS	456.950.000,00	431.175.000,00	25.775.000,00	94,36	
5.2.1.01.01.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	40.000.000,00	18.225.000,00	21.775.000,00	45,56	
5.2.1.01.02.	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	24.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00	83,33	
5.2.1.01.03.	Honorarium panitia pemeriksa barang	24.250.000,00	24.250.000,00	-	100,00	
5.2.1.01.04.	Honorarium tim teknis	368.700.000,00	368.700.000,00	-	100,00	
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.032.330.000,00	881.085.000,00	151.245.000,00	85,35	
5.2.1.02.02.	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	982.080.000,00	831.335.000,00	150.745.000,00	84,65	
5.2.1.02.03.	Honorarium tenaga pendukung kegiatan	50.250.000,00	49.750.000,00	500.000,00	99,00	
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.880.019.665,00	57.073.504.155,00	13.806.515.510,00	80,52	
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	583.903.400,00	383.888.300,00	200.015.100,00	65,75	
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	58.465.250,00	57.939.300,00	525.950,00	99,10	
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.862.550,00	7.816.550,00	46.000,00	99,41	
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19.773.100,00	15.853.100,00	3.920.000,00	80,18	
5.2.2.01.06.	Belanja bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas	497.802.500,00	302.279.350,00	195.523.150,00	60,72	
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.194.280.000,00	1.065.842.517,00	128.437.483,00	89,25	
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	4.800.000,00	1.283.157,00	3.516.843,00	26,73	
5.2.2.03.02.	Belanja air	33.600.000,00	20.875.400,00	12.724.600,00	62,13	
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	393.000.000,00	283.493.960,00	109.506.040,00	72,14	
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	26.400.000,00	23.710.000,00	2.690.000,00	89,81	
5.2.2.03.12.	Belanja propaganda dan dokumentasi	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
5.2.2.03.14.	Belanja iuran	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	715.000.000,00	715.000.000,00	-	100,00	
5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Survey Standar Satuan Harga	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	295.300.000,00	248.012.662,00	47.287.338,00	83,99	
5.2.2.05.02.	Belanja penggantian suku cadang	37.500.000,00	31.067.037,00	6.432.963,00	82,85	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
5.2.2.05.05.	Belanja surat tanda nomor kendaraan	113.300.000,00	77.772.300,00	35.527.700,00	68,64	
5.2.2.05.07.	Belanja perawatan/pemeliharaan kendaraan alat berat	144.500.000,00	139.173.325,00	5.326.675,00	96,31	
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.439.700,00	69.647.300,00	14.792.400,00	82,48	
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	28.426.525,00	20.471.500,00	7.955.025,00	72,02	
5.2.2.06.02.	Belanja penggandaan	56.013.175,00	49.175.800,00	6.837.375,00	87,79	
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	189.319.250,00	135.999.750,00	53.319.500,00	71,84	
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	106.028.000,00	97.071.000,00	8.957.000,00	91,55	
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.800.000,00	2.437.500,00	5.362.500,00	31,25	
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	72.991.250,00	36.491.250,00	36.500.000,00	49,99	
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	12.650.000,00	12.650.000,00	-	100,00	
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	12.650.000,00	12.650.000,00	-	100,00	
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	190.000.000,00	117.462.026,00	72.537.974,00	61,82	
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	190.000.000,00	117.462.026,00	72.537.974,00	61,82	
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	37.761.338.815,00	30.207.121.000,00	7.554.217.815,00	79,99	
5.2.2.20.01.	Belanja pemeliharaan jalan	28.728.631.400,00	24.655.044.000,00	4.073.587.400,00	85,82	
5.2.2.20.03.	Belanja pemeliharaan gedung tempat kerja	53.877.975,00	49.348.000,00	4.529.975,00	91,59	
5.2.2.20.04.	Belanja pemeliharaan gedung bukan tempat kerja	380.000.000,00	379.600.000,00	400.000,00	99,89	
5.2.2.20.05.	Belanja pemeliharaan rumah pompa	215.000.000,00	214.996.000,00	4.000,00	100,00	
5.2.2.20.06.	Belanja pemeliharaan jaringan air, listrik dan komunikasi	8.361.887.500,00	4.886.193.000,00	3.475.694.500,00	58,43	
5.2.2.20.13.	Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.191.940,00	7.190.000,00	1.940,00	99,97	
5.2.2.20.16.	Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan laboratorium	14.750.000,00	14.750.000,00	-	100,00	
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	5.349.262.500,00	2.971.537.500,00	2.377.725.000,00	55,55	
5.2.2.21.02.	Belanja jasa konsultansi perencanaan	4.362.204.500,00	2.486.748.500,00	1.875.456.000,00	57,01	
5.2.2.21.03.	Belanja jasa konsultansi pengawasan	987.058.000,00	484.789.000,00	502.269.000,00	49,11	
5.2.2.31.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	25.219.526.000,00	21.861.343.100,00	3.358.182.900,00	86,68	
5.2.2.31.01.	Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	25.219.526.000,00	21.861.343.100,00	3.358.182.900,00	86,68	
5.2.3.	BELANJA MODAL	74.842.574.423,00	60.055.565.650,00	14.787.008.773,00	80,24	
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	2.240.000.000,00	2.221.625.999,00	18.374.001,00	99,18	
5.2.3.01.31.	Belanja modal pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah dan publik	2.240.000.000,00	2.221.625.999,00	18.374.001,00	99,18	
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	6.000.000,00	5.886.201,00	113.799,00	98,10	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
5.2.3.08.01.	Belanja modal pengadaan mesin las	5.000.000,00	4.963.959,00	36.041,00	99,28	
5.2.3.08.05.	Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel kecantikan	1.000.000,00	922.242,00	77.758,00	92,22	
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	4.720.000,00	280.000,00	94,40	
5.2.3.10.13.	Belanja modal mesin potong rumput	5.000.000,00	4.720.000,00	280.000,00	94,40	
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.500.000,00	8.735.000,00	1.765.000,00	83,19	
5.2.3.11.07.	Belanja modal pengadaan pendingin ruangan	10.500.000,00	8.735.000,00	1.765.000,00	83,19	
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	45.000.000,00	43.850.000,00	1.150.000,00	97,44	
5.2.3.12.02.	Belanja modal pengadaan komputer/PC	30.000.000,00	29.000.000,00	1.000.000,00	96,67	
5.2.3.12.03.	Belanja modal pengadaan komputer note book	15.000.000,00	14.850.000,00	150.000,00	99,00	
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	13.000.000,00	12.700.000,00	300.000,00	97,69	
5.2.3.17.06.	Belanja modal pengadaan radio UHF	13.000.000,00	12.700.000,00	300.000,00	97,69	
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	15.727.053.769,00	8.631.932.000,00	7.095.121.769,00	54,89	
5.2.3.21.01.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan.	11.896.813.769,00	4.802.867.000,00	7.093.946.769,00	40,37	
5.2.3.21.04.	Belanja modal peningkatan konstruksi jalan	3.830.240.000,00	3.829.065.000,00	1.175.000,00	99,97	
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	4.030.000.000,00	4.028.639.000,00	1.361.000,00	99,97	
5.2.3.22.04.	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	4.030.000.000,00	4.028.639.000,00	1.361.000,00	99,97	
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	41.750.720.654,00	37.347.421.800,00	4.403.298.854,00	89,45	
5.2.3.23.06.	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	30.181.601.308,00	27.061.818.800,00	3.119.782.508,00	89,66	
5.2.3.23.09.	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan/saluran pembuangan limbah	11.569.119.346,00	10.285.603.000,00	1.283.516.346,00	88,91	
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	11.015.300.000,00	7.750.055.650,00	3.265.244.350,00	70,36	
5.2.3.26.01.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	215.300.000,00	214.802.000,00	498.000,00	99,77	
5.2.3.26.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bukan Gedung Kantor	10.800.000.000,00	7.535.253.650,00	3.264.746.350,00	69,77	
	JUMLAH	154.430.297.956,00	126.088.004.025,00	28.342.293.931,00	81,65	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(149.112.430.100,00)	(124.650.523.025,00)	(24.461.907.075,00)	-	

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Halaman : 1

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	10.865.462.736,00	1.743.481.000,00	9.121.981.736,00	16,05	
1.03.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.865.462.736,00	1.743.481.000,00	9.121.981.736,00	16,05	
1.03.00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	10.865.462.736,00	1.743.481.000,00	9.121.981.736,00	16,05	
1.03.00.0.00.00.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	365.462.736,00	70.070.000,00	295.392.736,00	19,17	
1.03.00.0.00.00.4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	365.462.736,00	70.070.000,00	295.392.736,00	19,17	
1.03.00.0.00.00.4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	10.500.000.000,00	1.673.411.000,00	8.826.589.000,00	15,94	
1.03.00.0.00.00.4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.500.000.000,00	1.673.411.000,00	8.826.589.000,00	15,94	
	JUMLAH PENDAPATAN	10.865.462.736,00	1.743.481.000,00	9.121.981.736,00	16,05	
1.03.00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	146.248.603.685,00	120.112.210.440,89	26.136.393.244,11	82,13	
1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.512.395.728,00	9.275.433.335,00	236.962.393,00	97,51	
1.03.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.180.000,00	-	5.180.000,00	-	
1.03.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.180.000,00	-	5.180.000,00	-	
1.03.01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.180.000,00	-	5.180.000,00	-	
1.03.01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.180.000,00	-	5.180.000,00	-	
1.03.01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.180.000,00	-	5.180.000,00	-	
1.03.01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.180.000,00	-	5.180.000,00	-	
1.03.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.965.768.818,00	8.460.759.644,00	(494.990.826,00)	106,21	
1.03.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.394.263.818,00	7.108.072.144,00	(713.808.326,00)	111,16	
1.03.01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.394.263.818,00	7.108.072.144,00	(713.808.326,00)	111,16	
1.03.01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.394.263.818,00	7.108.072.144,00	(713.808.326,00)	111,16	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.020.034.514,00	4.970.068.614,00	(950.034.100,00)	123,63	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.953.626.089,00	3.764.902.024,00	(811.275.935,00)	127,47	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	329.846.828,00	375.970.804,00	(46.123.976,00)	113,98	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	185.730.000,00	238.250.000,00	(52.520.000,00)	128,28	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	127.350.000,00	149.325.000,00	(21.975.000,00)	117,26	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	183.729.540,00	248.038.500,00	(64.308.960,00)	135,00	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.219.216,00	7.823.587,00	(6.604.371,00)	641,69	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	56.329,00	60.464,00	(4.135,00)	107,34	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	195.667.687,00	154.843.532,00	40.824.155,00	79,14	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.323.586,00	7.713.675,00	(1.390.089,00)	121,98	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.970.748,00	23.141.028,00	(4.170.280,00)	121,98	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	17.514.491,00	-	17.514.491,00	-	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.374.229.304,00	2.138.003.530,00	236.225.774,00	90,05	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	41.600.000,00	32.000.000,00	9.600.000,00	76,92	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.332.629.304,00	2.106.003.530,00	226.625.774,00	90,28	
1.03.01.2.02.02.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	1.571.505.000,00	1.352.687.500,00	218.817.500,00	86,08	
1.03.01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.571.505.000,00	1.352.687.500,00	218.817.500,00	86,08	
1.03.01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.571.505.000,00	1.352.687.500,00	218.817.500,00	86,08	
1.03.01.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.571.505.000,00	1.352.687.500,00	218.817.500,00	86,08	
1.03.01.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.571.505.000,00	1.352.687.500,00	218.817.500,00	86,08	
1.03.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	11.250.000,00	-	11.250.000,00	-	
1.03.01.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	11.250.000,00	-	11.250.000,00	-	
1.03.01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.250.000,00	-	11.250.000,00	-	
1.03.01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	-	11.250.000,00	-	
1.03.01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	11.250.000,00	-	11.250.000,00	-	
1.03.01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.250.000,00	-	11.250.000,00	-	
1.03.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	245.865.000,00	66.649.600,00	179.215.400,00	27,11	
1.03.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.793.000,00	3.960.000,00	7.833.000,00	33,58	
1.03.01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.793.000,00	3.960.000,00	7.833.000,00	33,58	
1.03.01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.793.000,00	3.960.000,00	7.833.000,00	33,58	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	11.793.000,00	3.960.000,00	7.833.000,00	33,58	
1.03.01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.793.000,00	3.960.000,00	7.833.000,00	33,58	
1.03.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	24.072.000,00	6.891.000,00	17.181.000,00	28,63	
1.03.01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	24.072.000,00	6.891.000,00	17.181.000,00	28,63	
1.03.01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.072.000,00	6.891.000,00	17.181.000,00	28,63	
1.03.01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	24.072.000,00	6.891.000,00	17.181.000,00	28,63	
1.03.01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.072.000,00	6.891.000,00	17.181.000,00	28,63	
1.03.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	210.000.000,00	55.798.600,00	154.201.400,00	26,57	
1.03.01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	210.000.000,00	55.798.600,00	154.201.400,00	26,57	
1.03.01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	55.798.600,00	154.201.400,00	26,57	
1.03.01.2.06.09.5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	210.000.000,00	55.798.600,00	154.201.400,00	26,57	
1.03.01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	210.000.000,00	55.798.600,00	154.201.400,00	26,57	
1.03.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	23.000.000,00	-	23.000.000,00	-	
1.03.01.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	
1.03.01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	
1.03.01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	
1.03.01.2.07.06.5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	
1.03.01.2.07.06.5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	
1.03.01.2.07.11.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.03.01.2.07.11.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.03.01.2.07.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.03.01.2.07.11.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.03.01.2.07.11.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.03.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	649.803.000,00	375.213.791,00	274.589.209,00	57,74	
1.03.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	479.880.000,00	303.844.791,00	176.035.209,00	63,32	
1.03.01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	479.880.000,00	303.844.791,00	176.035.209,00	63,32	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	479.880.000,00	303.844.791,00	176.035.209,00	63,32	
1.03.01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	479.880.000,00	303.844.791,00	176.035.209,00	63,32	
1.03.01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	479.880.000,00	303.844.791,00	176.035.209,00	63,32	
1.03.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	169.923.000,00	71.369.000,00	98.554.000,00	42,00	
1.03.01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	169.923.000,00	71.369.000,00	98.554.000,00	42,00	
1.03.01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.923.000,00	71.369.000,00	98.554.000,00	42,00	
1.03.01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	142.523.000,00	68.969.000,00	73.554.000,00	48,39	
1.03.01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	142.523.000,00	68.969.000,00	73.554.000,00	48,39	
1.03.01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	27.400.000,00	2.400.000,00	25.000.000,00	8,76	
1.03.01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.400.000,00	2.400.000,00	25.000.000,00	8,76	
1.03.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	611.528.910,00	372.810.300,00	238.718.610,00	60,96	
1.03.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	540.302.500,00	372.810.300,00	167.492.200,00	69,00	
1.03.01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	540.302.500,00	372.810.300,00	167.492.200,00	69,00	
1.03.01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.302.500,00	372.810.300,00	167.492.200,00	69,00	
1.03.01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	404.815.000,00	316.503.700,00	88.311.300,00	78,18	
1.03.01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	404.815.000,00	316.503.700,00	88.311.300,00	78,18	
1.03.01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	35.250.000,00	10.406.600,00	24.843.400,00	29,52	
1.03.01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.250.000,00	10.406.600,00	24.843.400,00	29,52	
1.03.01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	100.237.500,00	45.900.000,00	54.337.500,00	45,79	
1.03.01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.237.500,00	45.900.000,00	54.337.500,00	45,79	
1.03.01.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	6.052.000,00	-	6.052.000,00	-	
1.03.01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.052.000,00	-	6.052.000,00	-	
1.03.01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.052.000,00	-	6.052.000,00	-	
1.03.01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.052.000,00	-	6.052.000,00	-	
1.03.01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.052.000,00	-	6.052.000,00	-	
1.03.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	65.174.410,00	-	65.174.410,00	-	
1.03.01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	65.174.410,00	-	65.174.410,00	-	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.174.410,00	-	65.174.410,00	-	
1.03.01.2.09.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	65.174.410,00	-	65.174.410,00	-	
1.03.01.2.09.09.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65.174.410,00	-	65.174.410,00	-	
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.811.440.250,00	10.226.651.000,00	584.789.250,00	94,59	
1.03.02.2.01.	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	208.431.900,00	69.155.000,00	139.276.900,00	33,18	
1.03.02.2.01.26.	REHABILITASI PINTU AIR/BENDUNG PENGENDALI BANJIR	84.788.450,00	25.125.000,00	59.663.450,00	29,63	
1.03.02.2.01.26.5.1	BELANJA OPERASI	84.788.450,00	25.125.000,00	59.663.450,00	29,63	
1.03.02.2.01.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.788.450,00	25.125.000,00	59.663.450,00	29,63	
1.03.02.2.01.26.5.1.02.01	Belanja Barang	638.450,00	-	638.450,00	-	
1.03.02.2.01.26.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	638.450,00	-	638.450,00	-	
1.03.02.2.01.26.5.1.02.02	Belanja Jasa	51.750.000,00	25.125.000,00	26.625.000,00	48,55	
1.03.02.2.01.26.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	51.750.000,00	25.125.000,00	26.625.000,00	48,55	
1.03.02.2.01.26.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	32.400.000,00	-	32.400.000,00	-	
1.03.02.2.01.26.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.400.000,00	-	32.400.000,00	-	
1.03.02.2.01.55.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN STASIUN POMPA BANJIR	123.643.450,00	44.030.000,00	79.613.450,00	35,61	
1.03.02.2.01.55.5.1	BELANJA OPERASI	123.643.450,00	44.030.000,00	79.613.450,00	35,61	
1.03.02.2.01.55.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.643.450,00	44.030.000,00	79.613.450,00	35,61	
1.03.02.2.01.55.5.1.02.01	Belanja Barang	618.450,00	-	618.450,00	-	
1.03.02.2.01.55.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	618.450,00	-	618.450,00	-	
1.03.02.2.01.55.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.375.000,00	-	1.375.000,00	-	
1.03.02.2.01.55.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.375.000,00	-	1.375.000,00	-	
1.03.02.2.01.55.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	121.650.000,00	44.030.000,00	77.620.000,00	36,19	
1.03.02.2.01.55.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	41.400.000,00	38.600.000,00	51,75	
1.03.02.2.01.55.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.650.000,00	2.630.000,00	19.020.000,00	12,15	
1.03.02.2.01.55.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
1.03.02.2.02.	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.603.008.350,00	10.157.496.000,00	445.512.350,00	95,80	
1.03.02.2.02.11.	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI TAMBAK	10.603.008.350,00	10.157.496.000,00	445.512.350,00	95,80	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	173.008.350,00	-	173.008.350,00	-	
1.03.02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.008.350,00	-	173.008.350,00	-	
1.03.02.2.02.11.5.1.02.01	Belanja Barang	608.350,00	-	608.350,00	-	
1.03.02.2.02.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	608.350,00	-	608.350,00	-	
1.03.02.2.02.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	
1.03.02.2.02.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	
1.03.02.2.02.11.5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	170.000.000,00	-	170.000.000,00	-	
1.03.02.2.02.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	170.000.000,00	-	170.000.000,00	-	
1.03.02.2.02.11.5.2	BELANJA MODAL	10.430.000.000,00	10.157.496.000,00	272.504.000,00	97,39	
1.03.02.2.02.11.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.430.000.000,00	10.157.496.000,00	272.504.000,00	97,39	
1.03.02.2.02.11.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.430.000.000,00	10.157.496.000,00	272.504.000,00	97,39	
1.03.02.2.02.11.5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.430.000.000,00	10.157.496.000,00	272.504.000,00	97,39	
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	21.279.720.700,00	18.396.525.836,80	2.883.194.863,20	86,45	
1.03.03.2.01.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.279.720.700,00	18.396.525.836,80	2.883.194.863,20	86,45	
1.03.03.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SPAM	1.075.359.500,00	672.585.000,00	402.774.500,00	62,55	
1.03.03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.075.359.500,00	672.585.000,00	402.774.500,00	62,55	
1.03.03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.075.359.500,00	672.585.000,00	402.774.500,00	62,55	
1.03.03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	824.500,00	-	824.500,00	-	
1.03.03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	824.500,00	-	824.500,00	-	
1.03.03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.074.535.000,00	672.585.000,00	401.950.000,00	62,59	
1.03.03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	-	1.950.000,00	-	
1.03.03.2.01.01.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.072.585.000,00	672.585.000,00	400.000.000,00	62,71	
1.03.03.2.01.03.	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERKOTAAN	20.204.361.200,00	17.723.940.836,80	2.480.420.363,20	87,72	
1.03.03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.279.500,00	-	4.279.500,00	-	
1.03.03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.279.500,00	-	4.279.500,00	-	
1.03.03.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	879.500,00	-	879.500,00	-	
1.03.03.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	879.500,00	-	879.500,00	-	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.03.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.400.000,00	-	3.400.000,00	-	
1.03.03.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	-	3.400.000,00	-	
1.03.03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	20.200.081.700,00	17.723.940.836,80	2.476.140.863,20	87,74	
1.03.03.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.200.081.700,00	17.723.940.836,80	2.476.140.863,20	87,74	
1.03.03.2.01.03.5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	20.200.081.700,00	17.723.940.836,80	2.476.140.863,20	87,74	
1.03.03.2.01.03.5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	20.200.081.700,00	17.723.940.836,80	2.476.140.863,20	87,74	
1.03.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	572.005.254,00	196.131.000,00	375.874.254,00	34,29	
1.03.04.2.01.	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	572.005.254,00	196.131.000,00	375.874.254,00	34,29	
1.03.04.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	51.675.500,00	49.800.000,00	1.875.500,00	96,37	
1.03.04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	51.675.500,00	49.800.000,00	1.875.500,00	96,37	
1.03.04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.675.500,00	49.800.000,00	1.875.500,00	96,37	
1.03.04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	875.500,00	-	875.500,00	-	
1.03.04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	875.500,00	-	875.500,00	-	
1.03.04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	50.800.000,00	49.800.000,00	1.000.000,00	98,03	
1.03.04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.03.04.2.01.01.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	49.800.000,00	49.800.000,00	-	100,00	
1.03.04.2.01.03.	PEMBANGUNAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	520.329.754,00	146.331.000,00	373.998.754,00	28,12	
1.03.04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.658.000,00	-	2.658.000,00	-	
1.03.04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.658.000,00	-	2.658.000,00	-	
1.03.04.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	708.000,00	-	708.000,00	-	
1.03.04.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	708.000,00	-	708.000,00	-	
1.03.04.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.950.000,00	-	1.950.000,00	-	
1.03.04.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	-	1.950.000,00	-	
1.03.04.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	517.671.754,00	146.331.000,00	371.340.754,00	28,27	
1.03.04.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	517.671.754,00	146.331.000,00	371.340.754,00	28,27	
1.03.04.2.01.03.5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	517.671.754,00	146.331.000,00	371.340.754,00	28,27	
1.03.04.2.01.03.5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	517.671.754,00	146.331.000,00	371.340.754,00	28,27	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.481.149.000,00	3.345.038.500,00	1.136.110.500,00	74,65	
1.03.05.2.01.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.481.149.000,00	3.345.038.500,00	1.136.110.500,00	74,65	
1.03.05.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	344.372.000,00	292.560.000,00	51.812.000,00	84,95	
1.03.05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	344.372.000,00	292.560.000,00	51.812.000,00	84,95	
1.03.05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.502.000,00	149.690.000,00	51.812.000,00	74,29	
1.03.05.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	712.000,00	-	712.000,00	-	
1.03.05.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	712.000,00	-	712.000,00	-	
1.03.05.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	200.790.000,00	149.690.000,00	51.100.000,00	74,55	
1.03.05.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-	
1.03.05.2.01.01.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	199.690.000,00	149.690.000,00	50.000.000,00	74,96	
1.03.05.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	142.870.000,00	142.870.000,00	-	100,00	
1.03.05.2.01.01.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	142.870.000,00	142.870.000,00	-	100,00	
1.03.05.2.01.01.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	142.870.000,00	142.870.000,00	-	100,00	
1.03.05.2.01.03.	PEMBANGUNAN/PENYEDIAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT SKALA KOTA	4.136.777.000,00	3.052.478.500,00	1.084.298.500,00	73,79	
1.03.05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.616.060.000,00	1.610.074.500,00	5.985.500,00	99,63	
1.03.05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.060.000,00	183.074.500,00	5.985.500,00	96,83	
1.03.05.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	4.910.000,00	4.224.500,00	685.500,00	86,04	
1.03.05.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.910.000,00	4.224.500,00	685.500,00	86,04	
1.03.05.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	184.150.000,00	178.850.000,00	5.300.000,00	97,12	
1.03.05.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	80.200.000,00	74.900.000,00	5.300.000,00	93,39	
1.03.05.2.01.03.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	103.950.000,00	103.950.000,00	-	100,00	
1.03.05.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	1.427.000.000,00	1.427.000.000,00	-	100,00	
1.03.05.2.01.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.427.000.000,00	1.427.000.000,00	-	100,00	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.05.2.01.03.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.427.000.000,00	1.427.000.000,00	-	100,00	
1.03.05.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	2.520.717.000,00	1.442.404.000,00	1.078.313.000,00	57,22	
1.03.05.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.520.717.000,00	1.442.404.000,00	1.078.313.000,00	57,22	
1.03.05.2.01.03.5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.520.717.000,00	1.442.404.000,00	1.078.313.000,00	57,22	
1.03.05.2.01.03.5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.520.717.000,00	1.442.404.000,00	1.078.313.000,00	57,22	
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	26.823.126.714,00	21.985.317.943,24	4.837.808.770,76	81,96	
1.03.06.2.01.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.823.126.714,00	21.985.317.943,24	4.837.808.770,76	81,96	
1.03.06.2.01.05.	PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	17.958.692.164,00	14.630.766.443,24	3.327.925.720,76	81,47	
1.03.06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.749.000,00	-	4.749.000,00	-	
1.03.06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.749.000,00	-	4.749.000,00	-	
1.03.06.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.349.000,00	-	1.349.000,00	-	
1.03.06.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.349.000,00	-	1.349.000,00	-	
1.03.06.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.400.000,00	-	3.400.000,00	-	
1.03.06.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	-	3.400.000,00	-	
1.03.06.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	17.953.943.164,00	14.630.766.443,24	3.323.176.720,76	81,49	
1.03.06.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.953.943.164,00	14.630.766.443,24	3.323.176.720,76	81,49	
1.03.06.2.01.05.5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	17.953.943.164,00	14.630.766.443,24	3.323.176.720,76	81,49	
1.03.06.2.01.05.5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	17.953.943.164,00	14.630.766.443,24	3.323.176.720,76	81,49	
1.03.06.2.01.07.	REHABILITASI SALURAN DRAINASE PERKOTAAN	1.155.781.300,00	911.634.000,00	244.147.300,00	78,88	
1.03.06.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.155.781.300,00	911.634.000,00	244.147.300,00	78,88	
1.03.06.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.155.781.300,00	911.634.000,00	244.147.300,00	78,88	
1.03.06.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	97.300,00	-	97.300,00	-	
1.03.06.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	97.300,00	-	97.300,00	-	
1.03.06.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	284.430.000,00	249.680.000,00	34.750.000,00	87,78	
1.03.06.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	-	1.750.000,00	-	
1.03.06.2.01.07.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	282.680.000,00	249.680.000,00	33.000.000,00	88,33	
1.03.06.2.01.07.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	871.254.000,00	661.954.000,00	209.300.000,00	75,98	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.06.2.01.07.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	871.254.000,00	661.954.000,00	209.300.000,00	75,98	
1.03.06.2.01.09.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE	7.708.653.250,00	6.442.917.500,00	1.265.735.750,00	83,58	
1.03.06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	7.708.653.250,00	6.442.917.500,00	1.265.735.750,00	83,58	
1.03.06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.708.653.250,00	6.442.917.500,00	1.265.735.750,00	83,58	
1.03.06.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	6.832.750,00	3.600.000,00	3.232.750,00	52,69	
1.03.06.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.832.750,00	3.600.000,00	3.232.750,00	52,69	
1.03.06.2.01.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	199.195.500,00	115.736.500,00	83.459.000,00	58,10	
1.03.06.2.01.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	
1.03.06.2.01.09.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	195.995.500,00	115.736.500,00	80.259.000,00	59,05	
1.03.06.2.01.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.502.625.000,00	6.323.581.000,00	1.179.044.000,00	84,28	
1.03.06.2.01.09.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.502.625.000,00	6.323.581.000,00	1.179.044.000,00	84,28	
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	28.666.017.562,00	23.623.840.886,91	5.042.176.675,09	82,41	
1.03.08.2.01.	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	28.666.017.562,00	23.623.840.886,91	5.042.176.675,09	82,41	
1.03.08.2.01.01.	PENYELENGGARAAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), PERAN TENAGA AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG), PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG, SERTA IMPLEMENTASI SIMBG	162.096.500,00	135.000.000,00	27.096.500,00	83,28	
1.03.08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	162.096.500,00	135.000.000,00	27.096.500,00	83,28	
1.03.08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.096.500,00	135.000.000,00	27.096.500,00	83,28	
1.03.08.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.171.500,00	-	2.171.500,00	-	
1.03.08.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.171.500,00	-	2.171.500,00	-	
1.03.08.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	159.925.000,00	135.000.000,00	24.925.000,00	84,41	
1.03.08.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	159.925.000,00	135.000.000,00	24.925.000,00	84,41	
1.03.08.2.01.02.	PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN, DAN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.502.091.562,00	23.488.840.886,91	5.013.250.675,09	82,41	
1.03.08.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.779.553.128,00	2.912.174.000,00	1.867.379.128,00	60,93	
1.03.08.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	635.078.750,00	100.275.000,00	534.803.750,00	15,79	
1.03.08.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.503.750,00	-	1.503.750,00	-	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.08.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.503.750,00	-	1.503.750,00	-	
1.03.08.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	303.575.000,00	100.275.000,00	203.300.000,00	33,03	
1.03.08.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.775.000,00	375.000,00	3.400.000,00	9,93	
1.03.08.2.01.02.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	299.800.000,00	99.900.000,00	199.900.000,00	33,32	
1.03.08.2.01.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	330.000.000,00	-	330.000.000,00	-	
1.03.08.2.01.02.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	330.000.000,00	-	330.000.000,00	-	
1.03.08.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	4.144.474.378,00	2.811.899.000,00	1.332.575.378,00	67,85	
1.03.08.2.01.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.144.474.378,00	2.811.899.000,00	1.332.575.378,00	67,85	
1.03.08.2.01.02.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.144.474.378,00	2.811.899.000,00	1.332.575.378,00	67,85	
1.03.08.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	23.722.538.434,00	20.576.666.886,91	3.145.871.547,09	86,74	
1.03.08.2.01.02.5.2.01	Belanja Modal Tanah	14.113.999.000,00	12.230.324.820,00	1.883.674.180,00	86,65	
1.03.08.2.01.02.5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	14.113.999.000,00	12.230.324.820,00	1.883.674.180,00	86,65	
1.03.08.2.01.02.5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	14.113.999.000,00	12.230.324.820,00	1.883.674.180,00	86,65	
1.03.08.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.608.539.434,00	8.346.342.066,91	1.262.197.367,09	86,86	
1.03.08.2.01.02.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	9.303.539.434,00	8.346.342.066,91	957.197.367,09	89,71	
1.03.08.2.01.02.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.303.539.434,00	8.346.342.066,91	957.197.367,09	89,71	
1.03.08.2.01.02.5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	305.000.000,00	-	305.000.000,00	-	
1.03.08.2.01.02.5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	305.000.000,00	-	305.000.000,00	-	
1.03.08.2.01.03.	PENYUSUNAN REGULASI TERKAIT BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN/KOTA	1.829.500,00	-	1.829.500,00	-	
1.03.08.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.829.500,00	-	1.829.500,00	-	
1.03.08.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.829.500,00	-	1.829.500,00	-	
1.03.08.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.179.500,00	-	1.179.500,00	-	
1.03.08.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.179.500,00	-	1.179.500,00	-	
1.03.08.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	650.000,00	-	650.000,00	-	
1.03.08.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	-	650.000,00	-	
1.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	14.614.825.215,00	9.751.954.558,94	4.862.870.656,06	66,73	
1.03.09.2.01.	PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.614.825.215,00	9.751.954.558,94	4.862.870.656,06	66,73	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.09.2.01.03.	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	14.614.825.215,00	9.751.954.558,94	4.862.870.656,06	66,73	
1.03.09.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	14.614.825.215,00	9.751.954.558,94	4.862.870.656,06	66,73	
1.03.09.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	554.949.844,00	332.854.993,28	222.094.850,72	59,98	
1.03.09.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	248.136.244,00	232.629.993,28	15.506.250,72	93,75	
1.03.09.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	248.136.244,00	232.629.993,28	15.506.250,72	93,75	
1.03.09.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	306.813.600,00	100.225.000,00	206.588.600,00	32,67	
1.03.09.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.375.000,00	425.000,00	1.950.000,00	17,89	
1.03.09.2.01.03.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	304.438.600,00	99.800.000,00	204.638.600,00	32,78	
1.03.09.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	14.059.875.371,00	9.419.099.565,66	4.640.775.805,34	66,99	
1.03.09.2.01.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.059.875.371,00	9.419.099.565,66	4.640.775.805,34	66,99	
1.03.09.2.01.03.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	14.059.875.371,00	9.419.099.565,66	4.640.775.805,34	66,99	
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	28.844.380.262,00	22.779.321.380,00	6.065.058.882,00	78,97	
1.03.10.2.01.	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	28.844.380.262,00	22.779.321.380,00	6.065.058.882,00	78,97	
1.03.10.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	201.369.000,00	-	201.369.000,00	-	
1.03.10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	201.369.000,00	-	201.369.000,00	-	
1.03.10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.369.000,00	-	201.369.000,00	-	
1.03.10.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.067.000,00	-	1.067.000,00	-	
1.03.10.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.067.000,00	-	1.067.000,00	-	
1.03.10.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	200.302.000,00	-	200.302.000,00	-	
1.03.10.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-	
1.03.10.2.01.01.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	199.202.000,00	-	199.202.000,00	-	
1.03.10.2.01.04.	SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	2.267.000,00	-	2.267.000,00	-	
1.03.10.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.267.000,00	-	2.267.000,00	-	
1.03.10.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.267.000,00	-	2.267.000,00	-	
1.03.10.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	1.067.000,00	-	1.067.000,00	-	
1.03.10.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.067.000,00	-	1.067.000,00	-	
1.03.10.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.10.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.03.10.2.01.05.	PEMBANGUNAN JALAN	13.940.801.825,00	11.455.590.380,00	2.485.211.445,00	82,17	
1.03.10.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.467.000,00	-	4.467.000,00	-	
1.03.10.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.467.000,00	-	4.467.000,00	-	
1.03.10.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.067.000,00	-	1.067.000,00	-	
1.03.10.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.067.000,00	-	1.067.000,00	-	
1.03.10.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.400.000,00	-	3.400.000,00	-	
1.03.10.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	-	3.400.000,00	-	
1.03.10.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	13.936.334.825,00	11.455.590.380,00	2.480.744.445,00	82,20	
1.03.10.2.01.05.5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.530.215.560,00	2.472.867.880,00	57.347.680,00	97,73	
1.03.10.2.01.05.5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.530.215.560,00	2.472.867.880,00	57.347.680,00	97,73	
1.03.10.2.01.05.5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	2.530.215.560,00	2.472.867.880,00	57.347.680,00	97,73	
1.03.10.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.406.119.265,00	8.982.722.500,00	2.423.396.765,00	78,75	
1.03.10.2.01.05.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	11.406.119.265,00	8.982.722.500,00	2.423.396.765,00	78,75	
1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	10.398.613.430,00	8.702.839.500,00	1.695.773.930,00	83,69	
1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.007.505.835,00	279.883.000,00	727.622.835,00	27,78	
1.03.10.2.01.10.	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	13.493.240.437,00	10.626.807.000,00	2.866.433.437,00	78,76	
1.03.10.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	6.962.791.437,00	4.592.094.000,00	2.370.697.437,00	65,95	
1.03.10.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.962.791.437,00	4.592.094.000,00	2.370.697.437,00	65,95	
1.03.10.2.01.10.5.1.02.01	Belanja Barang	1.067.000,00	-	1.067.000,00	-	
1.03.10.2.01.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.067.000,00	-	1.067.000,00	-	
1.03.10.2.01.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	43.154.000,00	39.754.000,00	3.400.000,00	92,12	
1.03.10.2.01.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	-	3.400.000,00	-	
1.03.10.2.01.10.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	39.754.000,00	39.754.000,00	-	100,00	
1.03.10.2.01.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.918.570.437,00	4.552.340.000,00	2.366.230.437,00	65,80	
1.03.10.2.01.10.5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
1.03.10.2.01.10.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.718.570.437,00	4.552.340.000,00	2.166.230.437,00	67,76	
1.03.10.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	6.530.449.000,00	6.034.713.000,00	495.736.000,00	92,41	
1.03.10.2.01.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.530.449.000,00	6.034.713.000,00	495.736.000,00	92,41	
1.03.10.2.01.10.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	6.530.449.000,00	6.034.713.000,00	495.736.000,00	92,41	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.10.2.01.10.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	6.530.449.000,00	6.034.713.000,00	495.736.000,00	92,41	
1.03.10.2.01.11.	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	1.206.702.000,00	696.924.000,00	509.778.000,00	57,75	
1.03.10.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.206.702.000,00	696.924.000,00	509.778.000,00	57,75	
1.03.10.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.206.702.000,00	696.924.000,00	509.778.000,00	57,75	
1.03.10.2.01.11.5.1.02.01	Belanja Barang	2.461.000,00	-	2.461.000,00	-	
1.03.10.2.01.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.461.000,00	-	2.461.000,00	-	
1.03.10.2.01.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.800.000,00	-	2.800.000,00	-	
1.03.10.2.01.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	-	2.800.000,00	-	
1.03.10.2.01.11.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.201.441.000,00	696.924.000,00	504.517.000,00	58,01	
1.03.10.2.01.11.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.201.441.000,00	696.924.000,00	504.517.000,00	58,01	
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	643.543.000,00	531.996.000,00	111.547.000,00	82,67	
1.03.12.2.04.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	643.543.000,00	531.996.000,00	111.547.000,00	82,67	
1.03.12.2.04.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG PENATAAN RUANG	339.062.000,00	256.121.000,00	82.941.000,00	75,54	
1.03.12.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	339.062.000,00	256.121.000,00	82.941.000,00	75,54	
1.03.12.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.062.000,00	256.121.000,00	82.941.000,00	75,54	
1.03.12.2.04.02.5.1.02.01	Belanja Barang	17.567.000,00	2.001.000,00	15.566.000,00	11,39	
1.03.12.2.04.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.567.000,00	2.001.000,00	15.566.000,00	11,39	
1.03.12.2.04.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	321.495.000,00	254.120.000,00	67.375.000,00	79,04	
1.03.12.2.04.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	321.495.000,00	254.120.000,00	67.375.000,00	79,04	
1.03.12.2.04.04.	KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	304.481.000,00	275.875.000,00	28.606.000,00	90,60	
1.03.12.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	304.481.000,00	275.875.000,00	28.606.000,00	90,60	
1.03.12.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.481.000,00	275.875.000,00	28.606.000,00	90,60	
1.03.12.2.04.04.5.1.02.01	Belanja Barang	2.106.000,00	-	2.106.000,00	-	
1.03.12.2.04.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.106.000,00	-	2.106.000,00	-	
1.03.12.2.04.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	302.375.000,00	275.875.000,00	26.500.000,00	91,24	
1.03.12.2.04.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	28.125.000,00	1.625.000,00	26.500.000,00	5,78	
1.03.12.2.04.04.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	274.250.000,00	274.250.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	146.248.603.685,00	120.112.210.440,89	26.136.393.244,11	82,13	

1.03.0.00.0.00.01.00. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
	SURPLUS/(DEFISIT)	(135.383.140.949,00)	(118.368.729.440,89)	(17.014.411.508,11)	-	

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Halaman : 1

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	9.200.000.000,00	2.938.430.582,25	6.261.569.417,75	31,94	
1.03.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.200.000.000,00	2.938.430.582,25	6.261.569.417,75	31,94	
1.03.00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	9.200.000.000,00	2.938.430.582,25	6.261.569.417,75	31,94	
1.03.00.0.00.00.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	200.000.000,00	206.433.000,00	(6.433.000,00)	103,22	
1.03.00.0.00.00.4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00	206.433.000,00	(6.433.000,00)	103,22	
1.03.00.0.00.00.4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	9.000.000.000,00	2.731.997.582,25	6.268.002.417,75	30,36	
1.03.00.0.00.00.4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	9.000.000.000,00	2.731.997.582,25	6.268.002.417,75	30,36	
	JUMLAH PENDAPATAN	9.200.000.000,00	2.938.430.582,25	6.261.569.417,75	31,94	
1.03.00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	117.349.486.671,00	95.793.018.117,99	21.556.468.553,01	81,63	
1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.118.390.517,00	9.801.922.932,00	316.467.585,00	96,87	
1.03.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	47.826.555,00	44.501.269,00	3.325.286,00	93,05	
1.03.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	47.826.555,00	44.501.269,00	3.325.286,00	93,05	
1.03.01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	47.826.555,00	44.501.269,00	3.325.286,00	93,05	
1.03.01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.826.555,00	44.501.269,00	3.325.286,00	93,05	
1.03.01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	12.826.555,00	10.801.269,00	2.025.286,00	84,21	
1.03.01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.826.555,00	10.801.269,00	2.025.286,00	84,21	
1.03.01.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	35.000.000,00	33.700.000,00	1.300.000,00	96,29	
1.03.01.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	33.700.000,00	1.300.000,00	96,29	
1.03.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.236.082.819,00	8.502.809.970,00	(266.727.151,00)	103,24	
1.03.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.574.102.819,00	6.971.618.470,00	(397.515.651,00)	106,05	
1.03.01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.574.102.819,00	6.971.618.470,00	(397.515.651,00)	106,05	
1.03.01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.574.102.819,00	6.971.618.470,00	(397.515.651,00)	106,05	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.148.571.079,00	4.643.840.816,00	(495.269.737,00)	111,94	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.932.952.098,00	3.538.157.720,00	(605.205.622,00)	120,63	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	334.578.033,00	348.232.036,00	(13.654.003,00)	104,08	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	183.540.000,00	214.195.750,00	(30.655.750,00)	116,70	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	129.140.000,00	135.000.000,00	(5.860.000,00)	104,54	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	181.544.870,00	226.674.600,00	(45.129.730,00)	124,86	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.131.263,00	6.975.779,00	(5.844.516,00)	616,64	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	57.664,00	56.045,00	1.619,00	97,19	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	340.609.315,00	145.403.542,00	195.205.773,00	42,69	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.146.068,00	7.286.337,00	(1.140.269,00)	118,55	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.438.195,00	21.859.007,00	(3.420.812,00)	118,55	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	20.433.573,00	-	20.433.573,00	-	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.342.721.740,00	2.260.279.830,00	82.441.910,00	96,48	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	28.800.000,00	19.200.000,00	9.600.000,00	66,67	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.313.921.740,00	2.241.079.830,00	72.841.910,00	96,85	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	82.810.000,00	67.497.824,00	15.312.176,00	81,51	
1.03.01.2.02.01.5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	82.810.000,00	67.497.824,00	15.312.176,00	81,51	
1.03.01.2.02.02.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	1.661.980.000,00	1.531.191.500,00	130.788.500,00	92,13	
1.03.01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.661.980.000,00	1.531.191.500,00	130.788.500,00	92,13	
1.03.01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.661.980.000,00	1.531.191.500,00	130.788.500,00	92,13	
1.03.01.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.661.980.000,00	1.531.191.500,00	130.788.500,00	92,13	
1.03.01.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.661.980.000,00	1.531.191.500,00	130.788.500,00	92,13	
1.03.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00	
1.03.01.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00	
1.03.01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00	
1.03.01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00	
1.03.01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00	
1.03.01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	371.534.204,00	257.869.541,00	113.664.663,00	69,41	
1.03.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.471.623,00	4.681.615,00	5.790.008,00	44,71	
1.03.01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.471.623,00	4.681.615,00	5.790.008,00	44,71	
1.03.01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.471.623,00	4.681.615,00	5.790.008,00	44,71	
1.03.01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	10.471.623,00	4.681.615,00	5.790.008,00	44,71	
1.03.01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.471.623,00	4.681.615,00	5.790.008,00	44,71	
1.03.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	38.726.437,00	34.678.107,00	4.048.330,00	89,55	
1.03.01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	38.726.437,00	34.678.107,00	4.048.330,00	89,55	
1.03.01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.726.437,00	34.678.107,00	4.048.330,00	89,55	
1.03.01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	38.726.437,00	34.678.107,00	4.048.330,00	89,55	
1.03.01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.726.437,00	34.678.107,00	4.048.330,00	89,55	
1.03.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	322.336.144,00	218.509.819,00	103.826.325,00	67,79	
1.03.01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	322.336.144,00	218.509.819,00	103.826.325,00	67,79	
1.03.01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.336.144,00	218.509.819,00	103.826.325,00	67,79	
1.03.01.2.06.09.5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	322.336.144,00	218.509.819,00	103.826.325,00	67,79	
1.03.01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	322.336.144,00	218.509.819,00	103.826.325,00	67,79	
1.03.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	628.441.291,00	397.835.506,00	230.605.785,00	63,31	
1.03.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	488.880.000,00	296.407.684,00	192.472.316,00	60,63	
1.03.01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	488.880.000,00	296.407.684,00	192.472.316,00	60,63	
1.03.01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.880.000,00	296.407.684,00	192.472.316,00	60,63	
1.03.01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	488.880.000,00	296.407.684,00	192.472.316,00	60,63	
1.03.01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	488.880.000,00	296.407.684,00	192.472.316,00	60,63	
1.03.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	139.561.291,00	101.427.822,00	38.133.469,00	72,68	
1.03.01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	139.561.291,00	101.427.822,00	38.133.469,00	72,68	
1.03.01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.561.291,00	101.427.822,00	38.133.469,00	72,68	
1.03.01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	137.061.291,00	99.027.822,00	38.033.469,00	72,25	
1.03.01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	137.061.291,00	99.027.822,00	38.033.469,00	72,25	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.500.000,00	2.400.000,00	100.000,00	96,00	
1.03.01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.400.000,00	100.000,00	96,00	
1.03.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	825.355.648,00	589.756.646,00	235.599.002,00	71,45	
1.03.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	654.733.042,00	581.406.450,00	73.326.592,00	88,80	
1.03.01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	654.733.042,00	581.406.450,00	73.326.592,00	88,80	
1.03.01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	654.733.042,00	581.406.450,00	73.326.592,00	88,80	
1.03.01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	465.823.042,00	433.624.950,00	32.198.092,00	93,09	
1.03.01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	465.823.042,00	433.624.950,00	32.198.092,00	93,09	
1.03.01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	23.310.000,00	10.977.500,00	12.332.500,00	47,09	
1.03.01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.310.000,00	10.977.500,00	12.332.500,00	47,09	
1.03.01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	165.600.000,00	136.804.000,00	28.796.000,00	82,61	
1.03.01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	165.600.000,00	136.804.000,00	28.796.000,00	82,61	
1.03.01.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.622.606,00	8.350.196,00	12.272.410,00	40,49	
1.03.01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	20.622.606,00	8.350.196,00	12.272.410,00	40,49	
1.03.01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.622.606,00	8.350.196,00	12.272.410,00	40,49	
1.03.01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	20.622.606,00	8.350.196,00	12.272.410,00	40,49	
1.03.01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.622.606,00	8.350.196,00	12.272.410,00	40,49	
1.03.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	
1.03.01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	
1.03.01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	
1.03.01.2.09.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	
1.03.01.2.09.09.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	594.815.472,00	305.115.500,00	289.699.972,00	51,30	
1.03.02.2.01.	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	594.815.472,00	305.115.500,00	289.699.972,00	51,30	
1.03.02.2.01.26.	REHABILITASI PINTU AIR/BENDUNG PENGENDALI BANJIR	191.001.986,00	69.656.000,00	121.345.986,00	36,47	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.02.2.01.26.5.1	BELANJA OPERASI	191.001.986,00	69.656.000,00	121.345.986,00	36,47	
1.03.02.2.01.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.001.986,00	69.656.000,00	121.345.986,00	36,47	
1.03.02.2.01.26.5.1.02.01	Belanja Barang	4.200.986,00	-	4.200.986,00	-	
1.03.02.2.01.26.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.200.986,00	-	4.200.986,00	-	
1.03.02.2.01.26.5.1.02.02	Belanja Jasa	67.300.000,00	23.625.000,00	43.675.000,00	35,10	
1.03.02.2.01.26.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	67.300.000,00	23.625.000,00	43.675.000,00	35,10	
1.03.02.2.01.26.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	119.501.000,00	46.031.000,00	73.470.000,00	38,52	
1.03.02.2.01.26.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	119.501.000,00	46.031.000,00	73.470.000,00	38,52	
1.03.02.2.01.55.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN STASIUN POMPA BANJIR	403.813.486,00	235.459.500,00	168.353.986,00	58,31	
1.03.02.2.01.55.5.1	BELANJA OPERASI	403.813.486,00	235.459.500,00	168.353.986,00	58,31	
1.03.02.2.01.55.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.813.486,00	235.459.500,00	168.353.986,00	58,31	
1.03.02.2.01.55.5.1.02.01	Belanja Barang	900.986,00	-	900.986,00	-	
1.03.02.2.01.55.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	900.986,00	-	900.986,00	-	
1.03.02.2.01.55.5.1.02.02	Belanja Jasa	71.650.000,00	69.674.000,00	1.976.000,00	97,24	
1.03.02.2.01.55.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	-	1.650.000,00	-	
1.03.02.2.01.55.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	70.000.000,00	69.674.000,00	326.000,00	99,53	
1.03.02.2.01.55.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	331.262.500,00	165.785.500,00	165.477.000,00	50,05	
1.03.02.2.01.55.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	218.120.000,00	112.658.000,00	105.462.000,00	51,65	
1.03.02.2.01.55.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71.262.500,00	39.247.500,00	32.015.000,00	55,07	
1.03.02.2.01.55.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.880.000,00	13.880.000,00	28.000.000,00	33,14	
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.616.455.528,00	6.769.434.000,00	847.021.528,00	88,88	
1.03.03.2.01.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.616.455.528,00	6.769.434.000,00	847.021.528,00	88,88	
1.03.03.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SPAM	795.700.009,00	569.681.000,00	226.019.009,00	71,59	
1.03.03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	795.700.009,00	569.681.000,00	226.019.009,00	71,59	
1.03.03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	795.700.009,00	569.681.000,00	226.019.009,00	71,59	
1.03.03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	900.009,00	-	900.009,00	-	
1.03.03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	900.009,00	-	900.009,00	-	
1.03.03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	794.800.000,00	569.681.000,00	225.119.000,00	71,68	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.03.2.01.01.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	744.800.000,00	519.751.000,00	225.049.000,00	69,78	
1.03.03.2.01.01.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	49.930.000,00	70.000,00	99,86	
1.03.03.2.01.03.	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERKOTAAN	6.820.755.519,00	6.199.753.000,00	621.002.519,00	90,90	
1.03.03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.580.519,00	-	3.580.519,00	-	
1.03.03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.580.519,00	-	3.580.519,00	-	
1.03.03.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.030.519,00	-	1.030.519,00	-	
1.03.03.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.030.519,00	-	1.030.519,00	-	
1.03.03.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.550.000,00	-	2.550.000,00	-	
1.03.03.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	-	2.550.000,00	-	
1.03.03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	6.817.175.000,00	6.199.753.000,00	617.422.000,00	90,94	
1.03.03.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.817.175.000,00	6.199.753.000,00	617.422.000,00	90,94	
1.03.03.2.01.03.5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	6.817.175.000,00	6.199.753.000,00	617.422.000,00	90,94	
1.03.03.2.01.03.5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	6.817.175.000,00	6.199.753.000,00	617.422.000,00	90,94	
1.03.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	408.240.009,00	406.240.000,00	2.000.009,00	99,51	
1.03.04.2.01.	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	408.240.009,00	406.240.000,00	2.000.009,00	99,51	
1.03.04.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	36.900.009,00	34.900.000,00	2.000.009,00	94,58	
1.03.04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.900.009,00	34.900.000,00	2.000.009,00	94,58	
1.03.04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.900.009,00	34.900.000,00	2.000.009,00	94,58	
1.03.04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	900.009,00	-	900.009,00	-	
1.03.04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	900.009,00	-	900.009,00	-	
1.03.04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	36.000.000,00	34.900.000,00	1.100.000,00	96,94	
1.03.04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.03.04.2.01.01.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	35.000.000,00	34.900.000,00	100.000,00	99,71	
1.03.04.2.01.06.	PENYEDIAAN SARANA PERSAMPAHAN	371.340.000,00	371.340.000,00	-	100,00	
1.03.04.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	371.340.000,00	371.340.000,00	-	100,00	
1.03.04.2.01.06.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	371.340.000,00	371.340.000,00	-	100,00	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.04.2.01.06.5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	371.340.000,00	371.340.000,00	-	100,00	
1.03.04.2.01.06.5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	371.340.000,00	371.340.000,00	-	100,00	
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.204.208.168,00	4.951.417.800,00	252.790.368,00	95,14	
1.03.05.2.01.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.204.208.168,00	4.951.417.800,00	252.790.368,00	95,14	
1.03.05.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	551.195.159,00	299.355.000,00	251.840.159,00	54,31	
1.03.05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	551.195.159,00	299.355.000,00	251.840.159,00	54,31	
1.03.05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.195.159,00	299.355.000,00	251.840.159,00	54,31	
1.03.05.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.195.159,00	-	1.195.159,00	-	
1.03.05.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.195.159,00	-	1.195.159,00	-	
1.03.05.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	550.000.000,00	299.355.000,00	250.645.000,00	54,43	
1.03.05.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	99.800.000,00	200.000,00	99,80	
1.03.05.2.01.01.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	200.000.000,00	49.951.000,00	150.049.000,00	24,98	
1.03.05.2.01.01.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	250.000.000,00	149.604.000,00	100.396.000,00	59,84	
1.03.05.2.01.03.	PEMBANGUNAN/PENYEDIAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT SKALA KOTA	4.653.013.009,00	4.652.062.800,00	950.209,00	99,98	
1.03.05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.063.541.009,00	3.062.590.800,00	950.209,00	99,97	
1.03.05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.041.009,00	181.090.800,00	950.209,00	99,48	
1.03.05.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	13.940.809,00	13.040.800,00	900.009,00	93,54	
1.03.05.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.940.809,00	13.040.800,00	900.009,00	93,54	
1.03.05.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	148.100.200,00	148.100.000,00	200,00	100,00	
1.03.05.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	128.100.000,00	128.100.000,00	-	100,00	
1.03.05.2.01.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.000.200,00	20.000.000,00	200,00	100,00	
1.03.05.2.01.03.5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	20.000.000,00	19.950.000,00	50.000,00	99,75	
1.03.05.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.000.000,00	19.950.000,00	50.000,00	99,75	
1.03.05.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	2.881.500.000,00	2.881.500.000,00	-	100,00	
1.03.05.2.01.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.881.500.000,00	2.881.500.000,00	-	100,00	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.05.2.01.03.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.881.500.000,00	2.881.500.000,00	-	100,00	
1.03.05.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	1.589.472.000,00	1.589.472.000,00	-	100,00	
1.03.05.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	557.500.000,00	557.500.000,00	-	100,00	
1.03.05.2.01.03.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	557.500.000,00	557.500.000,00	-	100,00	
1.03.05.2.01.03.5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	557.500.000,00	557.500.000,00	-	100,00	
1.03.05.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.031.972.000,00	1.031.972.000,00	-	100,00	
1.03.05.2.01.03.5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.031.972.000,00	1.031.972.000,00	-	100,00	
1.03.05.2.01.03.5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.031.972.000,00	1.031.972.000,00	-	100,00	
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	20.405.565.357,00	14.955.588.683,00	5.449.976.674,00	73,29	
1.03.06.2.01.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.405.565.357,00	14.955.588.683,00	5.449.976.674,00	73,29	
1.03.06.2.01.05.	PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	13.658.842.385,00	11.408.379.883,00	2.250.462.502,00	83,52	
1.03.06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	181.450.986,00	149.195.000,00	32.255.986,00	82,22	
1.03.06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.450.986,00	149.195.000,00	32.255.986,00	82,22	
1.03.06.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	900.986,00	-	900.986,00	-	
1.03.06.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	900.986,00	-	900.986,00	-	
1.03.06.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	180.550.000,00	149.195.000,00	31.355.000,00	82,63	
1.03.06.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	-	2.550.000,00	-	
1.03.06.2.01.05.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	178.000.000,00	149.195.000,00	28.805.000,00	83,82	
1.03.06.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	13.477.391.399,00	11.259.184.883,00	2.218.206.516,00	83,54	
1.03.06.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.477.391.399,00	11.259.184.883,00	2.218.206.516,00	83,54	
1.03.06.2.01.05.5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	13.477.391.399,00	11.259.184.883,00	2.218.206.516,00	83,54	
1.03.06.2.01.05.5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	13.477.391.399,00	11.259.184.883,00	2.218.206.516,00	83,54	
1.03.06.2.01.07.	REHABILITASI SALURAN DRAINASE PERKOTAAN	327.200.986,00	272.125.000,00	55.075.986,00	83,17	
1.03.06.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	327.200.986,00	272.125.000,00	55.075.986,00	83,17	
1.03.06.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.200.986,00	272.125.000,00	55.075.986,00	83,17	
1.03.06.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	900.986,00	-	900.986,00	-	
1.03.06.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	900.986,00	-	900.986,00	-	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.06.2.01.07.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	326.300.000,00	272.125.000,00	54.175.000,00	83,40	
1.03.06.2.01.07.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	326.300.000,00	272.125.000,00	54.175.000,00	83,40	
1.03.06.2.01.09.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE	6.419.521.986,00	3.275.083.800,00	3.144.438.186,00	51,02	
1.03.06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	6.419.521.986,00	3.275.083.800,00	3.144.438.186,00	51,02	
1.03.06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.419.521.986,00	3.275.083.800,00	3.144.438.186,00	51,02	
1.03.06.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	900.986,00	-	900.986,00	-	
1.03.06.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	900.986,00	-	900.986,00	-	
1.03.06.2.01.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	80.256.000,00	80.256.000,00	-	100,00	
1.03.06.2.01.09.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	80.256.000,00	80.256.000,00	-	100,00	
1.03.06.2.01.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.338.365.000,00	3.194.827.800,00	3.143.537.200,00	50,40	
1.03.06.2.01.09.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.338.365.000,00	3.194.827.800,00	3.143.537.200,00	50,40	
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.991.427.139,00	9.115.460.378,00	875.966.761,00	91,23	
1.03.08.2.01.	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	9.991.427.139,00	9.115.460.378,00	875.966.761,00	91,23	
1.03.08.2.01.01.	PENYELENGGARAAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), PERAN TENAGA AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG), PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG, SERTA IMPLEMENTASI SIMBG	154.220.340,00	-	154.220.340,00	-	
1.03.08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	154.220.340,00	-	154.220.340,00	-	
1.03.08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.220.340,00	-	154.220.340,00	-	
1.03.08.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	895.340,00	-	895.340,00	-	
1.03.08.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	895.340,00	-	895.340,00	-	
1.03.08.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	153.325.000,00	-	153.325.000,00	-	
1.03.08.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	153.325.000,00	-	153.325.000,00	-	
1.03.08.2.01.02.	PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN, DAN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.836.331.872,00	9.115.460.378,00	720.871.494,00	92,67	
1.03.08.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.140.013.527,00	1.711.700.378,00	428.313.149,00	79,99	
1.03.08.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	957.003.149,00	528.690.000,00	428.313.149,00	55,24	
1.03.08.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	763.149,00	-	763.149,00	-	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.08.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	763.149,00	-	763.149,00	-	
1.03.08.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	626.930.000,00	199.380.000,00	427.550.000,00	31,80	
1.03.08.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	-	2.550.000,00	-	
1.03.08.2.01.02.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	624.380.000,00	199.380.000,00	425.000.000,00	31,93	
1.03.08.2.01.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	329.310.000,00	329.310.000,00	-	100,00	
1.03.08.2.01.02.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	329.310.000,00	329.310.000,00	-	100,00	
1.03.08.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	1.183.010.378,00	1.183.010.378,00	-	100,00	
1.03.08.2.01.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.183.010.378,00	1.183.010.378,00	-	100,00	
1.03.08.2.01.02.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.183.010.378,00	1.183.010.378,00	-	100,00	
1.03.08.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	7.696.318.345,00	7.403.760.000,00	292.558.345,00	96,20	
1.03.08.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.696.318.345,00	7.403.760.000,00	292.558.345,00	96,20	
1.03.08.2.01.02.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	7.391.968.345,00	7.099.410.000,00	292.558.345,00	96,04	
1.03.08.2.01.02.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.391.968.345,00	7.099.410.000,00	292.558.345,00	96,04	
1.03.08.2.01.02.5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	304.350.000,00	304.350.000,00	-	100,00	
1.03.08.2.01.02.5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	304.350.000,00	304.350.000,00	-	100,00	
1.03.08.2.01.03.	PENYUSUNAN REGULASI TERKAIT BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN/KOTA	874.927,00	-	874.927,00	-	
1.03.08.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	874.927,00	-	874.927,00	-	
1.03.08.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	874.927,00	-	874.927,00	-	
1.03.08.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	874.927,00	-	874.927,00	-	
1.03.08.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	874.927,00	-	874.927,00	-	
1.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	25.022.812.350,00	13.778.669.683,99	11.244.142.666,01	55,06	
1.03.09.2.01.	PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.022.812.350,00	13.778.669.683,99	11.244.142.666,01	55,06	
1.03.09.2.01.03.	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	25.022.812.350,00	13.778.669.683,99	11.244.142.666,01	55,06	
1.03.09.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.482.812.350,00	5.050.169.883,99	432.642.466,01	92,11	
1.03.09.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.994.715,00	114.790.250,00	2.204.465,00	98,12	
1.03.09.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	15.875.715,00	14.946.250,00	929.465,00	94,15	
1.03.09.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.875.715,00	14.946.250,00	929.465,00	94,15	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.09.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	101.119.000,00	99.844.000,00	1.275.000,00	98,74	
1.03.09.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.275.000,00	-	1.275.000,00	-	
1.03.09.2.01.03.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	99.844.000,00	99.844.000,00	-	100,00	
1.03.09.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	5.365.817.635,00	4.935.379.633,99	430.438.001,01	91,98	
1.03.09.2.01.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.365.817.635,00	4.935.379.633,99	430.438.001,01	91,98	
1.03.09.2.01.03.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.365.817.635,00	4.935.379.633,99	430.438.001,01	91,98	
1.03.09.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	19.540.000.000,00	8.728.499.800,00	10.811.500.200,00	44,67	
1.03.09.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.540.000.000,00	8.728.499.800,00	10.811.500.200,00	44,67	
1.03.09.2.01.03.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	19.540.000.000,00	8.728.499.800,00	10.811.500.200,00	44,67	
1.03.09.2.01.03.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	19.540.000.000,00	8.728.499.800,00	10.811.500.200,00	44,67	
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	37.359.042.752,00	35.672.749.813,00	1.686.292.939,00	95,49	
1.03.10.2.01.	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	37.359.042.752,00	35.672.749.813,00	1.686.292.939,00	95,49	
1.03.10.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	843.669.829,00	407.583.500,00	436.086.329,00	48,31	
1.03.10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	843.669.829,00	407.583.500,00	436.086.329,00	48,31	
1.03.10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	843.669.829,00	407.583.500,00	436.086.329,00	48,31	
1.03.10.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	896.829,00	-	896.829,00	-	
1.03.10.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	896.829,00	-	896.829,00	-	
1.03.10.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	842.773.000,00	407.583.500,00	435.189.500,00	48,36	
1.03.10.2.01.01.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	642.773.000,00	407.583.500,00	235.189.500,00	63,41	
1.03.10.2.01.01.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
1.03.10.2.01.05.	PEMBANGUNAN JALAN	4.243.837.942,00	4.039.518.113,00	204.319.829,00	95,19	
1.03.10.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.446.829,00	-	3.446.829,00	-	
1.03.10.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.446.829,00	-	3.446.829,00	-	
1.03.10.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	896.829,00	-	896.829,00	-	
1.03.10.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	896.829,00	-	896.829,00	-	
1.03.10.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.550.000,00	-	2.550.000,00	-	
1.03.10.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	-	2.550.000,00	-	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.10.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	4.240.391.113,00	4.039.518.113,00	200.873.000,00	95,26	
1.03.10.2.01.05.5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.566.000.000,00	1.566.000.000,00	-	100,00	
1.03.10.2.01.05.5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.566.000.000,00	1.566.000.000,00	-	100,00	
1.03.10.2.01.05.5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	1.566.000.000,00	1.566.000.000,00	-	100,00	
1.03.10.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.674.391.113,00	2.473.518.113,00	200.873.000,00	92,49	
1.03.10.2.01.05.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2.674.391.113,00	2.473.518.113,00	200.873.000,00	92,49	
1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	2.060.854.000,00	1.859.981.000,00	200.873.000,00	90,25	
1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	613.537.113,00	613.537.113,00	-	100,00	
1.03.10.2.01.09.	REHABILITASI JALAN	3.446.829,00	-	3.446.829,00	-	
1.03.10.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.446.829,00	-	3.446.829,00	-	
1.03.10.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.446.829,00	-	3.446.829,00	-	
1.03.10.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	896.829,00	-	896.829,00	-	
1.03.10.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	896.829,00	-	896.829,00	-	
1.03.10.2.01.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.550.000,00	-	2.550.000,00	-	
1.03.10.2.01.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	-	2.550.000,00	-	
1.03.10.2.01.10.	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	30.771.025.323,00	30.357.434.200,00	413.591.123,00	98,66	
1.03.10.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	30.459.898.323,00	30.046.307.200,00	413.591.123,00	98,64	
1.03.10.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.459.898.323,00	30.046.307.200,00	413.591.123,00	98,64	
1.03.10.2.01.10.5.1.02.01	Belanja Barang	896.829,00	-	896.829,00	-	
1.03.10.2.01.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	896.829,00	-	896.829,00	-	
1.03.10.2.01.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	30.459.001.494,00	30.046.307.200,00	412.694.294,00	98,65	
1.03.10.2.01.10.5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	198.247.000,00	198.247.000,00	-	100,00	
1.03.10.2.01.10.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.260.754.494,00	29.848.060.200,00	412.694.294,00	98,64	
1.03.10.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	311.127.000,00	311.127.000,00	-	100,00	
1.03.10.2.01.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	311.127.000,00	311.127.000,00	-	100,00	
1.03.10.2.01.10.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	311.127.000,00	311.127.000,00	-	100,00	
1.03.10.2.01.10.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	311.127.000,00	311.127.000,00	-	100,00	
1.03.10.2.01.11.	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	1.497.062.829,00	868.214.000,00	628.848.829,00	57,99	
1.03.10.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.497.062.829,00	868.214.000,00	628.848.829,00	57,99	
1.03.10.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.497.062.829,00	868.214.000,00	628.848.829,00	57,99	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.10.2.01.11.5.1.02.01	Belanja Barang	896.829,00	-	896.829,00	-	
1.03.10.2.01.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	896.829,00	-	896.829,00	-	
1.03.10.2.01.11.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.496.166.000,00	868.214.000,00	627.952.000,00	58,03	
1.03.10.2.01.11.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.496.166.000,00	868.214.000,00	627.952.000,00	58,03	
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	628.529.379,00	36.419.328,00	592.110.051,00	5,79	
1.03.12.2.01.	PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	18.455.490,00	1.003.490,00	17.452.000,00	5,44	
1.03.12.2.01.04.	SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG	18.455.490,00	1.003.490,00	17.452.000,00	5,44	
1.03.12.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	18.455.490,00	1.003.490,00	17.452.000,00	5,44	
1.03.12.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.455.490,00	1.003.490,00	17.452.000,00	5,44	
1.03.12.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	18.455.490,00	1.003.490,00	17.452.000,00	5,44	
1.03.12.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.455.490,00	1.003.490,00	17.452.000,00	5,44	
1.03.12.2.04.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	610.073.889,00	35.415.838,00	574.658.051,00	5,81	
1.03.12.2.04.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG PENATAAN RUANG	569.422.488,00	35.415.838,00	534.006.650,00	6,22	
1.03.12.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	569.422.488,00	35.415.838,00	534.006.650,00	6,22	
1.03.12.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	569.422.488,00	35.415.838,00	534.006.650,00	6,22	
1.03.12.2.04.02.5.1.02.01	Belanja Barang	23.222.488,00	17.715.838,00	5.506.650,00	76,29	
1.03.12.2.04.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.222.488,00	17.715.838,00	5.506.650,00	76,29	
1.03.12.2.04.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	546.200.000,00	17.700.000,00	528.500.000,00	3,24	
1.03.12.2.04.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	66.200.000,00	17.700.000,00	48.500.000,00	26,74	
1.03.12.2.04.02.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
1.03.12.2.04.02.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	180.000.000,00	-	180.000.000,00	-	
1.03.12.2.04.04.	KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	40.651.401,00	-	40.651.401,00	-	
1.03.12.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	40.651.401,00	-	40.651.401,00	-	
1.03.12.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.651.401,00	-	40.651.401,00	-	
1.03.12.2.04.04.5.1.02.01	Belanja Barang	5.251.401,00	-	5.251.401,00	-	
1.03.12.2.04.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.251.401,00	-	5.251.401,00	-	
1.03.12.2.04.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	35.400.000,00	-	35.400.000,00	-	

1.03.0.00.0.00.01.00. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
1.03.12.2.04.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.400.000,00	-	35.400.000,00	-	
	JUMLAH BELANJA	117.349.486.671,00	95.793.018.117,99	21.556.468.553,01	81,63	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(108.149.486.671,00)	(92.854.587.535,74)	(15.294.899.135,26)	-	